



**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Oleh:

**Khoiriana
NIM 140810301142**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Akuntansi

Oleh:

**Khoiriana
NIM 140810301142**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan Ridho, Rahmat dan KehendakMu sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Ibunda Misnipa dan Ayahanda Mistaru yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan dalam setiap keadaan yang saya alami;
3. Saudara dan teman-teman kos Graha Cendikia, UKM KOPMA UNEJ dan teman seperjuangan Akuntansi 2014 beserta sahabat-sahabatku, Eva, Zulfa, dan lainnya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi di masa perkuliahan;
4. Dosen Pembimbing saya Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak. dan Drs. Wasito, M.Si., Ak.;
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(Nabi Muhammad SAW)

**“Agar sukses, kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari
ketakutanmu akan kegagalan”**

(Bill Cosby)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoiriana

NIM : 140810301142

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada SKPD di Kabupaten Jember)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Juli 2018

Yang menyatakan,

Khoiriana

NIM 140810301142

SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Jember)**

Oleh :

Khoiriana

NIM 140810301142

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Wasito, M.Si., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi :Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, dan Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi empiris pada SKPD di Kabupaten
Jember)
Nama Mahasiswa : Khoiriana
NIM : 140810301142
Jurusan : S-1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 11 Oktober 2017

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Septarina Prita DS., S.E., M.SA, Ak.

NIP. 198209122006042002

Drs. Wasito, M.Si, Ak.

NIP. 196001031991031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak

NIP. 197809272001121002

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI
PENGARUH KOMPETENSI SDM, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, SPIP, DAN PENERAPAN SAP TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Jember)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Khoiriana
NIM : 140810301142
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

23 Juli 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Sudarno, M.Si., Ak (.....)
NIP. 196012251989021001

Sekretaris : Kartika, S.E., M.Sc, Ak (.....)
NIP. 198202072008122002

Anggota : Nur Hisamuddin, S.E., M.SA, Ak (.....)
NIP. 197910142009121001

Foto 4x6

Mengetahui,
Pelaksana Harian Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Zainuri, M.Si
NIP. 19640325 198902 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, SPIP dan penerapan SAP terhadap kualitas LKPD pada SKPD di Kabupaten Jember. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PPK-SKPD di Kabupaten Jember yaitu sebanyak 72 SKPD dan sampel dalam penelitian ini sejumlah 36 SKPD dengan 64 responden. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan metode *Purposive sampling* yaitu informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian merupakan data primer dan metode yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner. Jenis skala yang dipakai adalah skala *Likert* dengan diberi bobot 1-5. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dengan metode regresi linear berganda yaitu uji F, uji t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, SPIP, penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Jember.

Kata Kunci: kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, SPIP, penerapan SAP, Kualitas LKPD

ABSTRACT

This study aims to determine the variables of human resource competence, utilization of information technology, SPIP and the application of SAP to the quality of LKPD in SKPD in Jember. The population in this study were all the PPK-SKPD in Jember which is 72 SKPD and the sample in this study is 36 SKPD with 64 respondents. This sampling technique uses purposive sampling method that is information that will be taken comes from a source deliberately selected based on the criteria set by researchers. Technique of collecting data used research is primary data and the method used is the survey method by using questioner. The scale used is a Likert scale with a weight of 1 until 5. Data analysis method in this research use descriptive statistics, data quality test, classical assumption test, hypothesis test with multiple linear regression method that is F test, t test and coefficient of determination. The results of the research show that there is influence of human resource competence, utilization of information technology, SPIP, application of SAP to quality of LKPD in Jember.

Keywords: *human resource competence, utilization of information technology, SPIP, application of SAP, quality of LKPD*

RINGKASAN

“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Jember)”. Khoiriana, 140810301142; 2018; halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara yang diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi beberapa faktor, dalam penelitian ini berupa kompetensi Sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. SDM yang berkompoten dapat meminimalisir kesalahafsiran dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi yang tertuang dalam SAP serta dapat menerapkan SPIP dengan baik. Pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan maupun ketepatan. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi. Pengaruh antara sistem pengendalian intern dan kualitas LKPD yaitu sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan menjamin kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, sehingga pengendalian intern dapat memenuhi keakuratan data informasi dalam penyusunan LKPD. Selain itu dengan tidak adanya standar akuntansi yang berlaku dan memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, serta penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Populasi dalam penelitian seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Jember yaitu sebanyak 72 SKPD. Sampling yang digunakan yaitu teknik *Purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan adalah 36 SKPD dan responden yang dipilih yaitu responden yang telah memenuhi kriteria responden dalam penelitian ini sebanyak 64 responden, serta analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi Sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 87,2% dan sisanya sebesar 12,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada SKPD di Kabupaten Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada;

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, S.E,M.Com,Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi;
4. Septarina Prita Dania S., S.E., M.SA, Ak selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Wasito, M.Si., Ak selaku Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Nur Hisamuddin, SE, M. SA. Ak, CA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Seluruh Bapak dan ibu dosen Akuntansi yang telah memberikan ilmu mengenai akuntansi;
7. Seluruh PPK-SKPD Kabupaten Jember yang telah dengan senang hati menerima penulis untuk melakukan penelitian di masing-masing SKPD tersebut;
8. Seluruh keluargaku ayahanda, ibunda, dan saudara yang telah memberikan dukungan dan doa;

9. Sahabat tercinta yang senantiasa membantuku, memberiku motivasi dan dorongan: M. Jamil Hidayat, Zulfa Tutty Janiyah, Eva Rindias, sahabat kos tercinta “Kos Graha Cendikia” Yuni, Wati, Ninda, Riza dan Rizka, serta teman-teman tercinta dari “UKM KOPMA UNEJ” yang telah memberi banyak pengalaman dan pelajaran berharga;
10. Teman – teman seperjuangan Akuntansi 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan warna dalam proses perkuliahan dan membantu dalam terselesainya skripsi ini;
11. Semua pihak yang memberikan dorongan dan semangat secara langsung dan tidak langsung yang tidak dapat peneliti disebutkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti ketidaksempurnaan pada diri manusia. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 7 Juli 2018

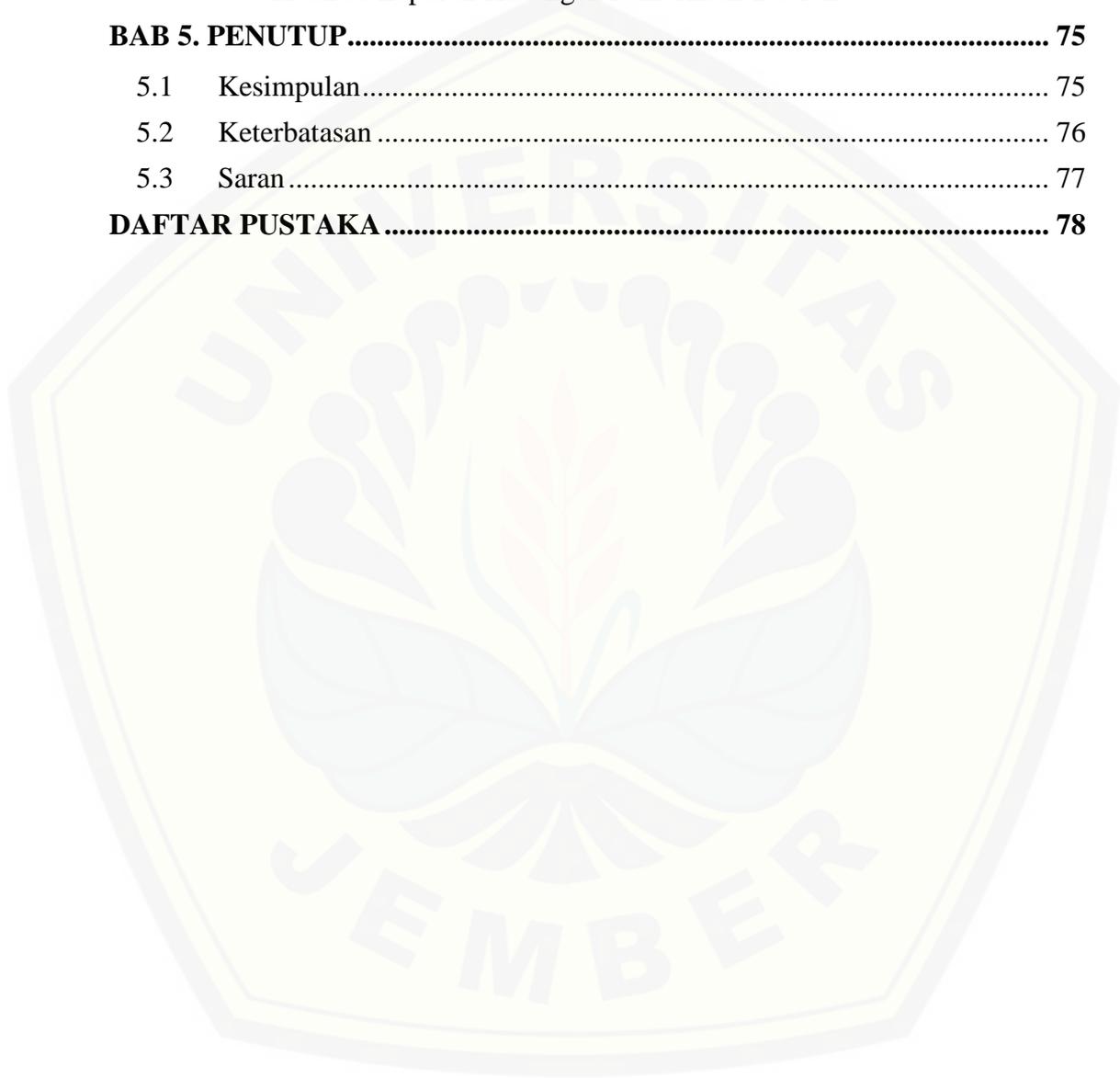
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	11
2.1.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	12
2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	17
2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi	19
2.1.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	20
2.1.6 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Konseptual	32
2.4 Pengembangan Hipotesis	34

2.4.1	Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD	34
2.4.2	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas LKPD	35
2.4.3	Pengaruh SPIP terhadap Kualitas LKPD	36
2.4.4	Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD	37
BAB 3. METODE PENELITIAN		38
3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Lokasi Penelitian	38
3.3	Populasi dan Sampel	38
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	40
3.5	Analisis Data	44
3.5.1	Statistik Deskriptif	44
3.5.2	Uji Kualitas Data.....	45
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	46
3.5.4	Pengujian Hipotesis.....	47
3.6	Kerangka Pemecahan Masalah.....	50
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		51
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	51
4.1.1	Sejarah Kabupaten Jember	51
4.1.2	Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jember	52
4.1.3	Kondisi Geografis	52
4.2	Hasil Analisis Data	53
4.2.1	Deskriptif Responden.....	53
4.2.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	57
4.2.3	Uji Kualitas Data.....	58
4.2.4	Uji Asumsi Klasik.....	62
4.3	Pengujian Hipotesis	64
4.3.1	Analisis Regresi Linear Berganda.....	64
4.3.2	Koefisien Determinasi.....	66
4.3.3	Uji F	67
4.3.4	Uji t	68
4.4	Pembahasan Hipotesis	70
4.4.1	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	70

4.4.2	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	72
4.4.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	73
4.4.4	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	74
BAB 5. PENUTUP.....		75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Keterbatasan	76
5.3	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		78

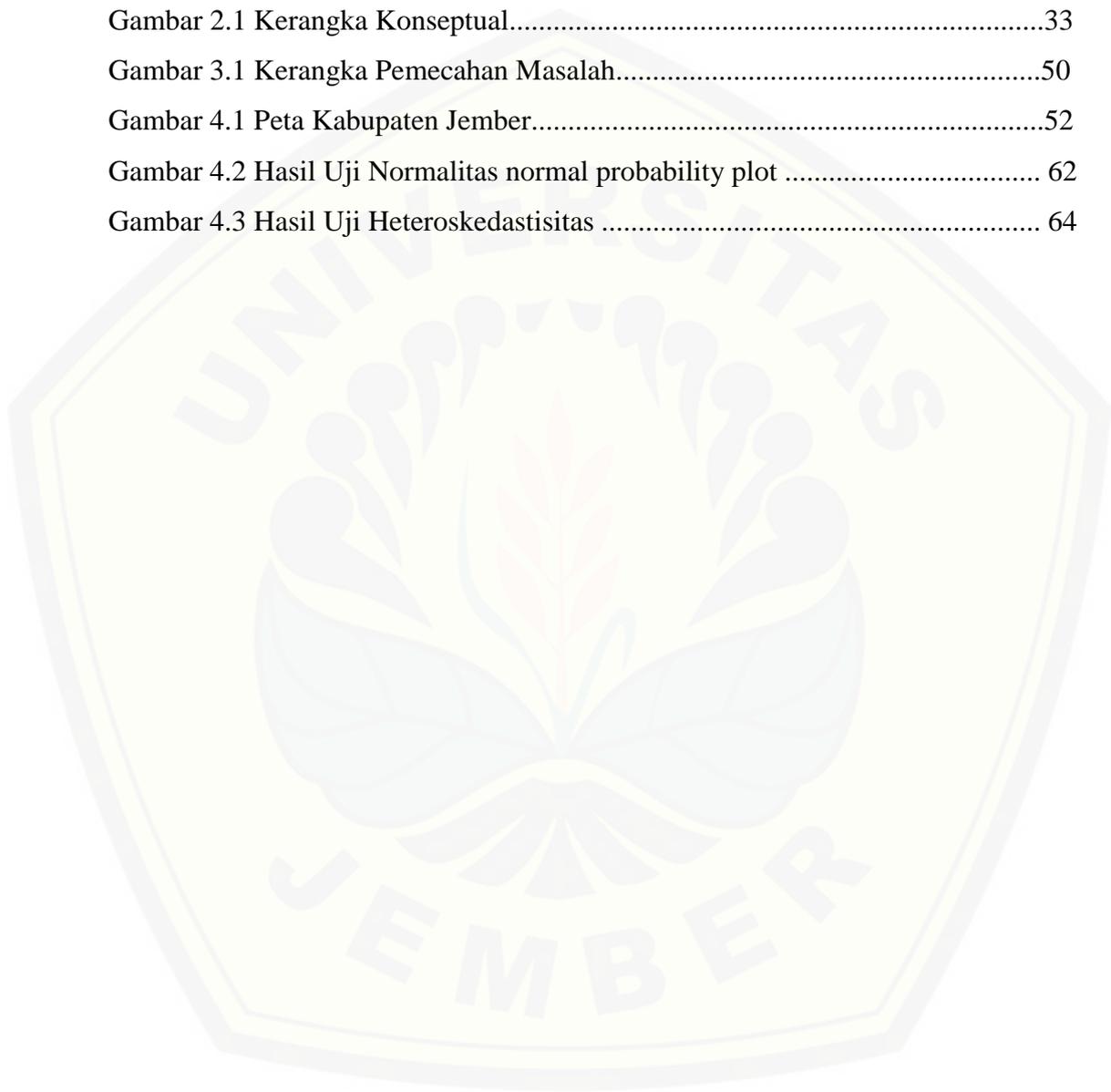


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Pengukuran Skala Likert.....	42
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner.....	53
Tabel 4.2 Daftar Responden Penelitian.....	54
Tabel 4.3 Jenis Kelamin.....	55
Tabel 4.4 Lama Menjabat	56
Tabel 4.5 Pendidikan Responden.....	56
Tabel 4.6 Hasil Statistik Deskriptif.....	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi SDM (X_1)	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)..	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel SPIP (X_3)	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan SAP (X_4)	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas LKPD (Y)	61
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas	61
Tabel 4.13 Rangkuman Hasil Uji Multikolinearitas	63
Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	65
Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	67
Tabel 4.16 Hasil Analisis Uji F.....	68
Tabel 4.17 Hasil Analisis Uji t.....	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perolehan opini atas LKPD Kabupaten Jember.....	8
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	33
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	50
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember.....	52
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas normal probability plot	62
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	64



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	82
Lampiran 2. Daftar Responden	94
Lampiran 3. Tabel Tabulasi Variabel Penelitian.....	97
Lampiran 4. Uji Kualitas Data	110
Lampiran 5. Uji Asumsi Klasik	127
Lampiran 6. Regresi	129
Lampiran 7. Tabel Distribusi r	132
Lampiran 8. Tabel Distribusi t	134
Lampiran 9. Tabel Distribusi f	136
Lampiran 10. Surat Ijin Penelitian	138
Lampiran 11. Surat Rekomendasi	140
Lampiran 12. Surat Ijin Penelitian dari SKPD.....	141
Lampiran 13. Dokumentasi.....	143

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002:17). Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata. Bentuk dari pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, sebagai upaya dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2002:20). Ruang lingkup akuntabilitas tidak saja pada bidang keuangan, tetapi meliputi akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas hasil. Akuntabilitas bukan hanya menyangkut proses, kinerja, dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output, serta akuntabilitas keuangan juga dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Riswanto, 2016). Beberapa konsep akuntabilitas yaitu mensyaratkan individu dan organisasi untuk dapat menghadapi segala konsekuensi atas kinerja (Koppell, 2005). Berdasarkan konsep ini, individu dan organisasi harus *liable* akan tindakan atau aksinya, memberikan hukuman atau

sanksi ketika terjadi pelanggaran, memberikan *reward* ketika individu tersebut memberikan kesuksesan serta tanggap terhadap keluhan masyarakat.

Setiap satuan kerja termasuk pemerintah daerah juga bertanggungjawab memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dengan otoritasnya memiliki kewenangan untuk mengatur dan merencanakan arah serta tujuan pembangunan yang akan dijalankan oleh daerah tersebut. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kemudian dapat dilihat melalui penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disingkat LPPD. Dimana LPPD ini merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat RKPD (Kristalياهو, 2017).

Pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami dengan arti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan

operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud (PP No. 71, 2010).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017, BPK memeriksa 537 (99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2016. BPK memberikan opini WTP atas 375 (70%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 139 (26%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 (4%) LKPD. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015, kualitas LKPD Tahun 2016 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 12 poin persen yaitu dari 58% pada LKPD Tahun 2015 menjadi 70% pada LKPD Tahun 2016. Dalam 5 tahun terakhir (2012-2016), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 47 poin persen. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 11 poin persen.

Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan LKPD Tahun 2015, tetapi terdapat 23 dari 537 (4%) LKPD yang mengalami penurunan opini. Secara keseluruhan dari 537 LKPD Tahun 2016 yang belum memperoleh WTP sejumlah 162 LKPD yang terdiri atas 139 WDP dan 23 TMP. LKPD yang belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP. Pemkab Jember termasuk dalam daftar pemerintah daerah yang mengalami penurunan opini tersebut. Sehingga dengan mendapatkan opini WDP yang diperoleh Kabupaten Jember, maka kualitas LKPD Kabupaten Jember perlu dipertanyakan apa yang menyebabkan penurunan opini.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi beberapa faktor, pertama yaitu kompetensi sumber daya manusia (SDM). SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan didukung oleh latar belakang pendidikan akuntansi dalam pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, SDM tersebut sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Menurut Simanjuntak (2005:72) dalam Sudiarianti (2015)

dijelaskan bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan memerlukan SDM yang memiliki kompetensi serta menguasai akuntansi pemerintahan. SDM yang berkompeten dapat meminimalisir kesalahafsiran dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi yang tertuang dalam SAP serta dapat menerapkan SPIP dengan baik.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Rozi (2016) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan (secara statistik) terhadap keterandalan pelaporan keuangan SKPD Kabupaten Bondowoso. Namun menurut hasil penelitian Rachmawati (2014) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap kerandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali. Sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi akan sangat membantu dalam proses pengolahan data transaksi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh *human error*. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah oleh seluruh kalangan masyarakat.

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak/belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan bahkan bisa semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di

instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah menurut Indriasari dan Ertambang (2008) dalam Rozi (2016).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan salah satu variabel yang dianggap responden sebagai variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Purwati, 2014). Sistem pengendalian intern ini berkaitan dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemilik/manajer untuk mengendalikan kegiatan usaha (Winidyaningrum, 2010). SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal dibangun dari lima unsur sebagai berikut: (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; serta (e) pemantauan pengendalian intern (PP Nomor 60 Tahun 2008). Pengaruh antara sistem pengendalian intern dan kualitas LKPD yaitu sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan menjamin kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, sehingga pengendalian intern dapat memenuhi keakuratan data informasi dalam penyusunan LKPD (Susilowati dan Riana, 2014).

Data hasil pemeriksaan BPK pada semester I tahun 2017 atas 537 LKPD menunjukkan terdapat 6.053 kelemahan SPI yang terdiri atas 2.156 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.657 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.240 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern (IHPS 1, 2017).

Permasalahan kelemahan SPI secara umum terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan kepada pelaksana tugas serta dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, petugas pelaksana tidak cermat/ tidak tertib dalam melaksanakan tugas, TAPD kurang cermat dalam menelaah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD terkait dengan penganggaran pendapatan dan belanja BOS, pejabat yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memedomani ketentuan peraturan terkait dengan pendapatan dan belanja, dan TPKD kurang optimal dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah.

Faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kualitas LKPD yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengertian SAP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan (Lauma E.B dkk, 2015).

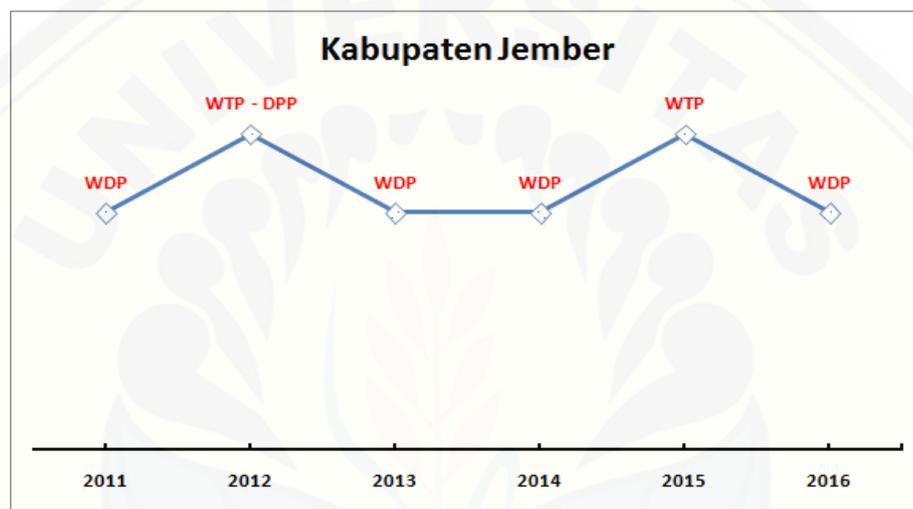
Kristaliahadi (2017) membuktikan secara empiris bahwa kemampuan Sumber Daya Manusia, penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Rozi (2016) dalam penelitiannya juga memperoleh hasil yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh temuan penelitian Anggun (2016) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kristaliahadi (2017), Rozi (2016) dan Anggun (2016) adalah pada pemilihan variabel independen yang digunakan yaitu kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada variabel dependen yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya, Rozi (2016) menggunakan variabel dependen keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sama halnya dengan penelitian sebelumnya yaitu Kristaliahadi (2017) dan Anggun (2016). Namun dalam penelitian Kristaliahadi menggunakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel intervening (pemediasi). Perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian. Jika Kristaliahadi (2017) meneliti pejabat penatausahaan keuangan SKPD di Kabupaten Situbondo dan Rozi (2016) meneliti SKPD di Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat masih banyak LKPD yang tidak dapat mencapai WTP. Obyek dalam penelitian ini adalah Kabupaten Jember yang merupakan salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan untuk dapat menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang ada. Alasan penulis melakukan penelitian pada Kabupaten Jember, dikarenakan Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang memperoleh opini WDP dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2017 untuk LKPD tahun 2016. Objek penelitian ini sama dengan objek penelitian sebelumnya yang dilakukan Anggun (2016) yaitu meneliti pada SKPD di Kabupaten Jember selaku penyusun LKPD. Perbedaannya adalah Anggun (2016) hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel independen yang diteliti oleh Anggun (2016) dengan ditambah 2 variabel independen yaitu penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah sehingga terdapat 4 variabel independen yang digunakan oleh penulis. Berdasarkan UU No.15 Tahun 2004, kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan dan efektifitas sistem pengendalian intern merupakan kriteria umum pemberian opini pemeriksaan BPK.

Setelah 2 tahun berturut-turut LKPD Kabupaten Jember memperoleh opini WDP, namun pada LKPD tahun 2015 Pemkab Jember menunjukkan perubahannya dengan mendapataka opini WTP. Akan tetapi, opini WTP yang diberikan BPK atas LKPD Kab. Jember tidak bertahan lama, LKPD tahun 2016 Kab Jember kembali mendapatkan opini WDP.



Sumber: Surabaya.bpk.go.id (akses terakhir pada 24 Des 2017)

Gambar 1.1 Perolehan opini atas LKPD Kabupaten Jember

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada SKPD di Kabupaten Jember)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris serta menganalisis mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris serta menganalisis mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris serta menganalisis mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris serta menganalisis mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

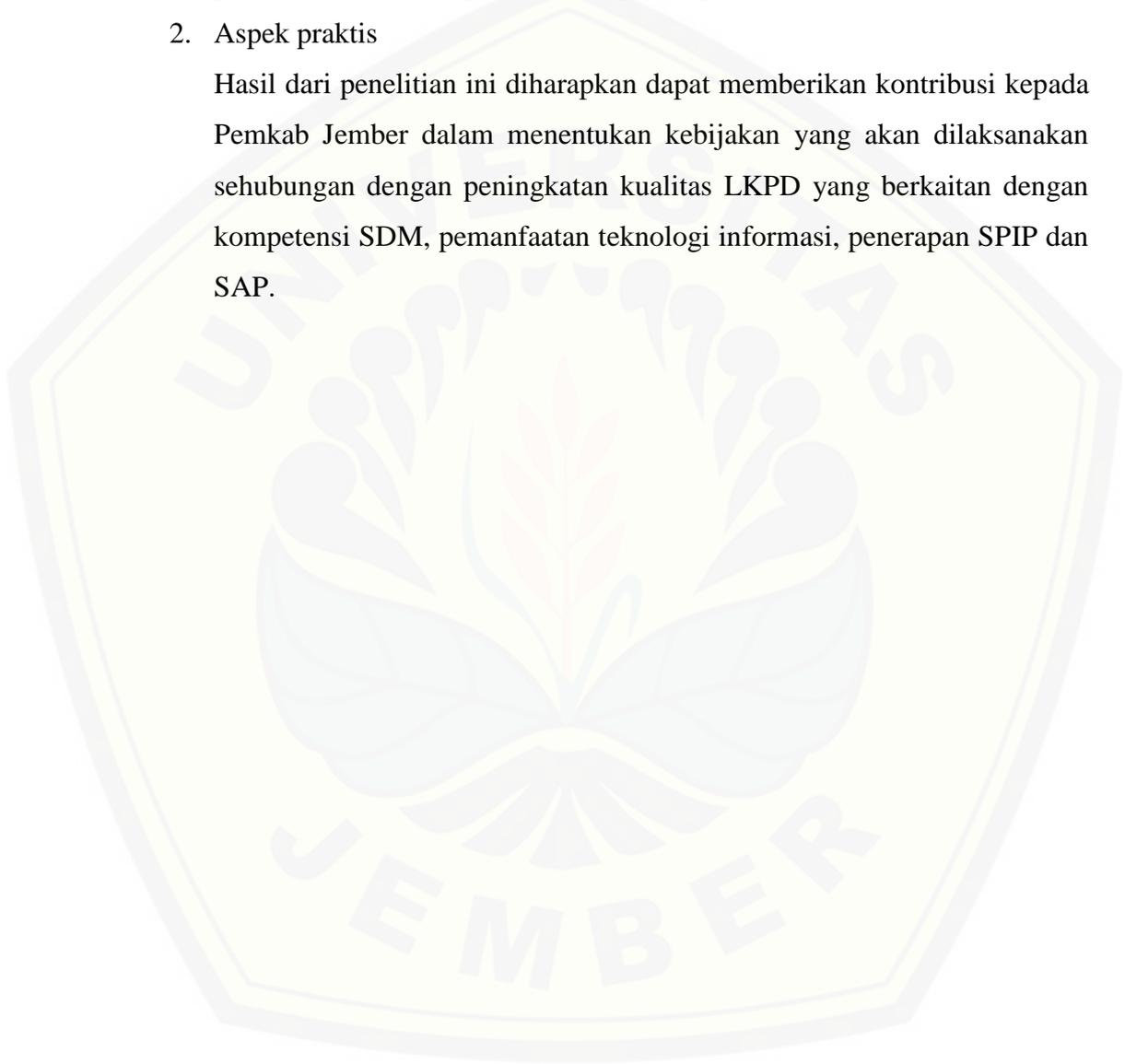
1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis peningkatan kualitas LKPD yang berkaitan dengan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan SPIP dan SAP.

2. Aspek praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemkab Jember dalam menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan peningkatan kualitas LKPD yang berkaitan dengan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan SPIP dan SAP.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu orang atau lebih memerintah orang lain untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agency*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut “*nexus of contract*” (Godfrey, 2010 dalam Zuliarti, 2012).

Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai agen. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost*. Pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*) (Rozi, 2016).

Pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai *principal*, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya (Fristina, 2011).

Menurut Suwardjono (2006:58) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Sedangkan menurut FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concept* mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui laporan keuangan.

2.1.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember No. 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember bahwa yang dimaksud entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember selaku pengguna anggaran/barang. SKPD yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan yang harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing SKPD yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Laporan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Erlina *et al.*, 2015: 19). Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Tujuan dan fungsi laporan keuangan organisasi pemerintah adalah (1) untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan organisasi pemerintahan, dan (2) untuk memberi informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional (Wiratna, 2015:90). Selanjutnya dijelaskan dalam Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 26 bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Selain itu, adapun tujuan laporan keuangan pemerintah menurut Pramono *et al.*, (2013:155) ialah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Berdasarkan beberapa tujuan laporan keuangan pemerintah menurut beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah bertujuan memberikan informasi yang digunakan dalam

pengambilan keputusan, menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya, serta sebagai bukti pertanggungjawaban organisasi pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah entitas pelaporan. Seperti yang dinyatakan Erlina *et al.*, (2015:19) bahwa laporan keuangan pada dasarnya digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PSAP BA) 01 dalam paragraf 14 dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kegiatan (Hafiz T, 2014: 11):

- a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada saat ini, pemerintah di Indonesia sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP Nomor 24 tahun 2005 menjadi PP Nomor 71 tahun 2010). Di dalamnya terdapat Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang memuat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Hafiz T, 2014: 13). Agar dapat memenuhi kualitas yang

dikehendaki, laporan keuangan pemerintah perlu memenuhi empat karakteristik berikut (PP 24/ 2005 menjadi PP 71/ 2010).

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membentuk mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi yang relevan:

- Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi/menjelaskan setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi atas laporan keuangan tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin sudah relevan, tetapi jika secara hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial

dapat menyesatkan. Karakteristik laporan keuangan yang andal adalah sebagai berikut:

- Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- Netral.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Sedarmayanti (2016) dalam bukunya menjelaskan bahwa kompetensi adalah segala hal pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik lain yang menyebabkan seseorang pemegang suatu jabatan mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dan memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan organisasi/perusahaan sesuai tingkat jabatan yang dipegangnya dapat diestimasikan bahwa kompetensi yang dibutuhkan agar organisasi dapat *survive* dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan. Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab

yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Perubahan lingkungan bisnis yang diindasikan oleh perkembangan teknologi komunikasi maupun teknologi informasi menyebabkan perusahaan tidak lagi membutuhkan tenaga kerja kasar (*blue collar*) melainkan tenaga kerja yang mampu menguasai teknologi yang ada dan memiliki bakat manajerial. Sehingga SDM yang terlibat dalam proses atau kegiatan perusahaan haruslah merupakan SDM yang memiliki basis pengetahuan (*knowledge based worker*) yang memiliki ketrampilan dan keahlian (*multiskilling worker*) (Anatan dan Ellitan, 2009:3). Tidak hanya dalam dunia bisnis, SDM juga mendapatkan peran yang semakin penting dalam mewujudkan organisasi atau pemerintahan termasuk pemerintahan daerah kompetitif dalam era globalisasi yang sedang dan akan berlangsung. Bagi pemerintahan, *good governance* adalah tujuan yang ingin dicapai melalui peran sumber daya manusia yang berkompeten. Tanpa sumber daya yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang pekerjaan dan tanggung jawabnya, organisasi khususnya pemerintahan akan gagal untuk mencapai tujuan dan eksistensinya.

Menurut Spencer (dalam Sedarmayanti, 1993:19), kompetensi memiliki karakteristik:

1. *Motives*: sesuatu yang secara konsisten dipikirkan oleh seseorang sehingga ia melakukan tindakan.
2. *Traits*: watak yang mempengaruhi bagaimana seseorang merespon berbagai informasi dan situasi dan berperilaku dengan cara tertentu. Watak seseorang ditunjukkan melalui kepercayaan diri, kontrol diri ketabahan/daya tahan.
3. *Self Concept*: sikap, nilai dan citra diri yang dimiliki seseorang. sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu.
4. *Knowledge*: informasi/pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks.
5. *Skills*: kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas fisik tertentu (tugas mental tertentu).

Sedangkan menurut Hevesi (2005) dalam Rozi (2016) kompetensi sumber daya merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*capability*) untuk melakukan sebuah pekerjaan.

Rendahnya kinerja pegawai kantor Pemda, jika dikaitkan dengan faktor kompetensi, menjadi sangat beralasan (Nur, 2015). Pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan Winanti (2011) yang dikutip oleh Nur (2015) yang menunjukkan bahwa kompetensi secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Organisasi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama memerlukan SDM yang berkualitas dan memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan daerahnya dengan meningkatkan daya saing daerah. Maka, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal dan mampu melihat potensi yang dimiliki daerah dan kemudian menciptakan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah tersebut.

2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kemajuan IT berpengaruh sangat signifikan pada perkembangan akuntansi yang kegiatannya tidak terlepas dari teknologi informasi tersebut. Semakin maju TI semakin banyak pengaruhnya pada bidang akuntansi. Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan. Dampak yang dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer (Eka, 2017).

Peirce (Lubbe dan Nauta, 1992: 5-6) mengemukakan dalam filosofi "triadic"-nya bahwa teknologi informasi adalah salah satu sudut segitiga sama sisi yang melambungkan teknologi; dua sudut lainnya adalah energi dan materi. Teknologi informasi sendiri lahir sekitar 1947 ditandai dengan ditemukannya komputer sebagai komponen utamanya, setelah masa teknologi yang mengeksploitasi materi 50.000 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-18 dan masa

teknologi yang mengeksploitasi energi mulai abad ke-18 sampai 1947. Lebih lanjut, Peirce (Lubbe dan Nauta, 1992: 6) menyatakan bahwa teknologi informasi dapat pula dilambangkan sebagai segitiga sama sisi dengan tiga titik sudutnya masing-masing automasi, simulasi/model, dan kecerdasan buatan/sistem berbasis pengetahuan (sistem pakar).

Davis (1989) dalam Hanggono (2015) memberikan beberapa indikator kemudahan penggunaan TI antara lain meliputi; (1) komputer sangat mudah dipelajari, (2) komputer mengerjakan dengan mudah apa yang diinginkan pengguna, (3) keterampilan pengguna bertambah dengan menggunakan komputer, dan (4) komputer sangat mudah untuk dioperasikan. Sedangkan kemanfaatan (*usefulness*) menurut Davis (1989) dalam Nasution (2004) merupakan suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu subyek tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pemanfaatan teknologi/komputer dapat meningkatkan kinerja dan prestasi kerja orang yang menggunakannya.

Joseph (1995) menjelaskan bahwa komputer dapat memroses transaksi sepanjang hari tanpa membuat kesalahan dari pada manusia. Komputer dapat menyimpan data lebih rapi dibandingkan dengan manusia dan dapat menyimpan data lebih banyak. Komputer juga dapat membantu menyajikan laporan keuangan lebih tepat waktu. Laporan ini dapat dapat dibuat serinci dan selektif yang diinginkan. Selain itu, komputer dapat membantu untuk menjaga informasi agar tetap mutakhir. Hal ini karena komputer dapat secara otomatis mengikuti seperangkat instruksi terinci yang diberi kode, yang disebut program, secara tepat dan konsisten. Akuntansi memiliki program dengan bantuan komputer yang memudahkan pengguna yaitu antara lain MYOB, Zahir, Excel dan sebagainya.

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.5.1 Pengertian SPIP

Pemerintah pada tahun 2008 telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang disingkat (SPIP). Menurut PP ini SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan

secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern itu sendiri memiliki arti, yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2010: 163) meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.1.5.2 Unsur-unsur SPIP

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam PP No. 60 Tahun 2008 mengacu pada Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara yang meliputi (Zamzami *et al.*, 2014):

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi, baik dari luar maupun dari dalam.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian organisasi.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan

sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP, dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan, konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

2.1.6 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Noerdiawan (2009:123) dalam Yuninggar (2017) penerapan SAP diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat daerah, yang berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Pada tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya pada tahun 2010 diterbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Sejak itu PP No. 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Penjelasan PP No. 71 Tahun 2010 memuat

pernyataan standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP yang terdiri dari 12 (dua belas) pernyataan standar yaitu:

1) PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengatur mengenai penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*grneral pupose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan versi Lampiran I.02 berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010. Akan tetapi, dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP tersebut, maka entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP No. 01 versi Lampiran II.02 (disebut PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual) adalah paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010 yaitu hingga Tahun Anggaran 2014. Perbedaan yang mendasari PSAP No. 01 versi Lampiran I.02 dengan versi Lampiran II.02 adalah basis akuntansi yang digunakan. Pada PSAP No. 01 versi Lampiran II.02, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban serta ekuitas dana. Sedangkan pada PSAP No. 01 versi Lampiran I.02, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Selain itu, pada PSAP No. 01 versi Lampiran I.02 dinyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang anggaran di mana hingga saat ini anggaran masih disusun berdasarkan basis kas. Akan tetapi, paragraph standar ini dimaksudkan apabila terjadi perubahan basis anggaran maka penyajian LRA dilakukan berdasarkan basis anggaran yang berlaku.

2) PSAP No. 02 tentang LRA

PSAP ini salah satunya menjelaskan manfaat dari Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Ruang lingkup dari pernyataan standar ini yaitu (a) diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas, (b) berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah, (c) Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

3) PSAP No. 03 tentang LAK

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Pernyataan Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan negara/daerah. Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

4) PSAP No. 04 tentang CaLK

Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Adanya penyajian CaLK juga untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah. Maka dari itu, tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5) PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan

Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. PSAP ini berisikan pengakuan persediaan, pengukuran persediaan, beban persediaan, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan. Pernyataan Standar ini tidak mengatur; (a) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan (b) Instrumen keuangan.

6) PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi

Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan teratur dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Berdasarkan PSAP ini Investasi pemerintah diklasifikasi menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedang investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar. Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.

7) PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah: (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; (b) Hak atas tanah. Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

8) PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

PSAP No. 08 ini berisikan mengenai gambaran umum konstruksi dalam pengerjaan, kontrak konstruksi, penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi, pengakuan konstruksi dalam pengerjaan, pengukuran, serta pengungkapannya. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib menerapkan standar ini. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk: (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan; (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca; (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi, serta memiliki tujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pekerjaan.

9) PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban

Sebagian besar instansi terutama instansi pemerintahan mempunyai kewajiban yang dalam penyelesaiannya terdapat sumber daya ekonomi di masa akan datang yang dikorbankan. Menurut PSAP ini Kewajiban umumnya timbul

karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Adanya Pernyataan Standar ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

10) PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan

Setiap melakukan suatu hal pastinya tidak lepas dari kesalahan sama halnya dalam menyusun laporan keuangan. Kesalahan yang biasanya terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Berdasarkan PSAP ini Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti 14 transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, 15 kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan 16 interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. Pada saat tertentu suatu kesalahan mungkin saja memiliki pengaruh yang signifikan bagi laporan keuangan periode sebelumnya. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan PSAP No. 10 ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

11) PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Ruang lingkup dari Pernyataan Standar ini yaitu Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi agar mencerminkan satu kesatuan entitas, laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan umum, serta laporan keuangan konsolidasian pada kementerian/

lembaga/pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. Pernyataan ini menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan konsolidasian, entitas pelaporan, entitas akuntansi, BLU/BLUD, prosedur konsolidasi, dan pengungkapannya.

12) PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Sehingga Pernyataan Standar ini menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini lebih mengacu pada penelitian Anggun (2016) dengan judul pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kabupaten Jember. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki serta semakin sering dalam memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada penelitian Hafidah (2016) yang berjudul pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap nilai informasi

pelaporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Situbondo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan satuan kerja perangkat daerah, yang berarti dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebaiknya dinas lebih memperhatikan penerapan Sistem Pengendalian Intern dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi serta pemanfaatan teknologi yang maksimal.

Adapun ringkasan dari penelitian terdahulu tersebut dan ada beberapa penelitian yang dijadikan acuan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Objek	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ariesta (2013)	Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat	Independen: Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi. Dependen: nilai informasi pelaporan keuangan	Kualitas SDM, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
2	Annisa Rachmawati (2014)	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali	Independen: Kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan pengendalian intern akuntansi. Dependen: Keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan	Kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh (secara statistik) tidak signifikan sedangkan pengendalian intern akuntansi berpengaruh (secara statistik) signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan

			pemerintah daerah	pelaporan keuangan daerah.
3	Susilowati dan Riana (2014)	Dinas Kota Bandung	Independen: SAP, SPI Dependen: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	SAP dan SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta SAP dan SPI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4	Febrian Nanda P (2014)	Satker Kementerian Agama di Jawa Timur	Independen: pemanfaatan teknologi informasi, kapasitas SDM, dan komitmen organisasi. Dependen: Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.	Pemanfaatan teknologi, kapasitas SDM, dan komitmen tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan .
5	Syarifuddin (2014)	Pemkab Kabumen	Independen: kompetensi SDM, peran audit intern, SPIP. Dependen: kualitas LKPD	Kompetensi SDM dan peran audit intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, namun kompetensi SDM dan peran audit intern berpengaruh signifikan terhadap SPIP. SPIP berpengaruh terhadap kualitas LKPD.
6	Sudiarianti (2015)	PPK pada lingkungan Pemkab Tabanan	Independen: Kompetensi SDM,	Kompetensi SDM berpengaruh positif pada penerapan SPIP, SAP, dan

			<p>penerapan SPIP, dan SAP.</p> <p>Dependen: Kualitas LKPD.</p>	<p>kualitas LKPD. Penerapan SPIP dan SAP berpengaruh pada kualitas LKPD. Kompetensi SDM berpengaruh pada kualitas LKPD melalui penerapan SPIP dan SAP.</p>
7	Rhintya Anggun F.M (2016)	SKPD di Kabupaten Jember	<p>Independen: kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>Dependen: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>	<p>Kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
8	M. Rozi Muzakki (2016)	SKPD di Kabupaten Bondowoso	<p>Independen: kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern.</p> <p>Dependen: keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.</p>	<p>Kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan SKPD Kabupaten Bondowoso.</p>
9	Nur Hafidah (2016)	SKPD do Kabupaten Situbondo	<p>Independen: Kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern.</p> <p>Dependen:</p>	<p>Kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah.</p>

			Nilai informasi pelaporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah	
10	Rizqi Nastasiya Amalia (2017)	Pemerintah daerah Kabupaten Jember	Independen: Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, kompetensi SDM Dependen: kualitas laporan keuangan daerah	Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sumber: Data diolah, 2017

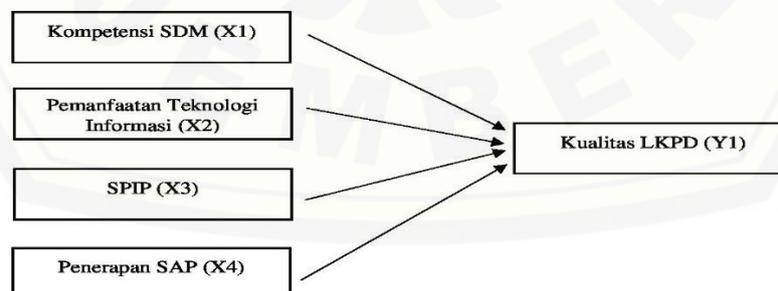
2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menunjukkan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti, yaitu pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, serta penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan merupakan syarat normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan tersebut. Maka dari itu LKPD yang dihasilkan harus berkualitas yang disusun dengan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Untuk mewujudkan LKPD yang berkualitas diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Kompetensi SDM yang dimaksud adalah mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Selain itu, dalam menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik, juga diperlukan teknologi yang mendukung

dalam proses penyusunan laporan keuangan maupun setiap transaksi ekonomi. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu penyusunan laporan keuangan selesai tepat waktu dan dapat mengurangi terjadinya *human error*. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik. SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SAP merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, yang mana dalam penyusunan dan penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. SPIP dan SAP merupakan hal yang perlu dipertimbangkan BPK dalam memberikan opini audit terhadap LKPD.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas LKPD

Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah dalam suatu organisasi, karena dengan sumber daya manusia yang baik dan berkompem akan dapat menentukan kemajuan atau berkembangnya suatu organisasi. Kompetensi sumber daya manusia yang baik dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang menjadi dasar pengetahuan dan kemampuan serta skill yang dibutuhkan pada masing-masing daerah. Merekrut sumber daya yang berkompeten dalam bidangnya merupakan suatu tindakan perubahan yang perlu dilakukan sebagai perbaikan sistem pemerintahan terutama terkait dengan sumber daya manusia. Sehingga dengan dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas maka tata kelola pemerintah menjadi baik yang sering disebut *good governance*.

Pada teori *agency*, pemerintah yang bertindak sebagai agen berkewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat (pengguna laporan keuangan). Informasi yang dimaksud adalah laporan keuangan yang berkualitas. Apabila yang menjalankan sistem akuntansi adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai, maka informasi akuntansi yang disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah akan menjadi berkualitas. Kompetensi sumber daya manusia juga dapat menghindari penyelewengan seperti tindak korupsi, manipulasi dan sebagainya. Semakin berkompeten sumber daya manusia yang dimiliki, maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin berkualitas.

Penelitian yang dilakukan Yuninggar (2017) diperoleh kesimpulan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif terhadap kualitas LKPD, hal ini berarti kualitas LKPD akan meningkat apabila kompetensi sumber daya manusianya baik. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan Syarifuddin (2014), menyimpulkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas LKPD dihipotesiskan sebagai berikut:

H₁: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD

2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas LKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Berbicara hal teknologi informasi tidak akan lepas dengan komputer atau benda lain yang digunakan/dipakai untuk memudahkan pekerjaan. Terdapat indikasi bahwa orang yang menggunakan TI bekerja lebih mudah dibandingkan dengan orang yang bekerja tanpa menggunakan TI (secara manual).

Penggunaan teknologi berupa komputer dapat membantu menyajikan laporan keuangan lebih tepat waktu dan mengurangi *human error*. Hal ini berpengaruh dan berguna bagi *principal* dalam pengambilan keputusan. Ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian Rozi (2016), Ariesta (2013), dan Rhintya (2016), didapat kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik. Dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi yang canggih dan modern, yang mampu memberikan keakuratan dalam hasil pelaporan, maka pelaporan keuangan memiliki nilai keandalan yang tinggi dan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan tersebut.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik khususnya pada pemerintahan sudah pernah dilakukan. Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan maupun ketepatan. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi. Berdasarkan uraian diatas penulis

menduga bahwa terdapat hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas LKPD dihipotesiskan sebagai berikut:

H₂: Pemanfaatan Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD

2.4.3 Pengaruh SPIP terhadap Kualitas LKPD

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Teori *agency* menyatakan dalam hubungan keagenan, pemerintah bisa saja melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dengan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat (*principal*). Dengan adanya sistem pengendalian yang baik dapat memperkecil adanya penyelewengan atau dapat meningkatkan keterandalan informasi yang dihasilkan oleh agen. Semakin tinggi keandalan informasi maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2014) dan Hafidah (2016) didapat kesimpulan bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bagus sistem pengendalian yang dibuat dan dipatuhi maka akan berdampak pada andal atau tidaknya laporan keuangan. Sama halnya sistem pengendalian intern yang diterapkan di pemerintahan daerah atau yang sering disebut SPIP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Susilowati dan Riana (2014), Syarifuddin (2014), Sudiarianti (2015), dan Kristialihadi (2017). Berdasarkan uraian diatas penulis menduga bahwa terdapat hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas LKPD dihipotesiskan sebagai berikut:

H₃: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD

2.4.4 Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas LKPD

SAP merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, yang mana dalam penyusunan dan penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan juga menjadi salah satu kriteria audit bagi auditor sebagai dasar penilaian apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur yang menyajikan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP 71, 2010).

Pada hubungan keagenan pemerintah (agen) berkewajiban menyajikan informasi bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah daerah dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang digunakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan konsisten. Sehingga informasi yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau entitas lain guna untuk pengambilan keputusan.

Beberapa peneliti sebelumnya, yaitu Yuninggar (2017) dan Amalia (2017) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD, yang artinya semakin baik penerapan SAP yang digunakan dan sesuai standar yang berlaku maka akan meningkatkan kualitas LKPD. Berdasarkan uraian diatas penulis menduga bahwa terdapat hubungan antara penerapan SAP dengan kualitas LKPD dihipotesiskan sebagai berikut:

H₄: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kausatif atau kausalitas. Desain penelitian kausatif adalah desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel, umumnya hubungan sebab-akibat tersebut sudah dapat diprediksi oleh peneliti (Anwar, 2014:13). Menurut Sugiyono (2014:137) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer adalah metode survei yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan mengadakan kuesioner (angket) sebagai pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa respons dari kepala dan staf bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), yang telah dikuantifikasi dengan cara memberi skor dalam kuisisioner.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SKPD Kabupaten Jember. Pertimbangan peneliti memilih SKPD di Kabupaten Jember karena dalam IHPS 1 Tahun 2017, opini audit yang diperoleh Kabupaten Jember atas pemeriksaan LKPD oleh BPK menunjukkan penurunan opini, di mana tahun sebelumnya Kabupaten Jember memperoleh opini WTP menjadi opini WDP untuk tahun 2017.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi (*population*) adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu (Ety *et al.*, 2007:35) Masalah populasi akan timbul pada penelitian opini yang menggunakan metode survei sebagai teknik pengumpulan data. Jika jumlah populasi terbatas (relatif kecil jumlahnya) maka

penelitian dilakukan terhadap keseluruhan populasi yang disebut dengan sensus. Sebaliknya jika jumlah populasi sangat besar maka penelitian dilakukan terhadap sebagian elemen-elemen populasi atau yang disebut dengan penelitian sampel. Menurut Sugiyono (2014:81) bahwa Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Maka dari itu, sejumlah sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili) populasi.

Populasi dalam penelitian berjumlah 72 SKPD yang ada di Kabupaten Jember. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* (pemilihan sampel bertujuan) dengan pembatasan pada dinas, badan, bagian, dan satuan saja dan memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun. Menurut Sekaran (dalam Indriasari dan Ertambang, 2003) *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD.
- b. Responden dalam penelitian ini adalah yaitu kepala bagian keuangan dan/atau staf bagian akuntansi, sehingga setiap SKPD ditetapkan secara *purposive sampling* maksimal 2 orang yang menjadi responden.

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian keuangan dan staf bagian akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. Menurut Sukmaningrum dalam Rhintya (2016) bahwa Kepala bagian keuangan SKPD merupakan pihak yang mempunyai wewenang dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya, perhitungan anggaran, serta membina, mengawasi, mengendalikan dan mengelola keuangan pemerintah daerah.

Jumlah SKPD di Kabupaten Jember yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 SKPD yang hanya dibatasi dinas, badan, bagian, dan satuan saja. Pembatasan ini dilakukan karena letak populasi dianggap terlalu berjauhan bagi peneliti. Penentuan jumlah responden dengan paling banyak 72 responden untuk 36 SKPD dengan masing-masing tiap SKPD maksimal 2 responden dan telah memenuhi kriteria menjadi responden yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian ini.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen juga disebut variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain (Anwar, 2014:50). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari kompetensi sumber daya manusia (X_1), Pemanfaatan teknologi informasi (X_2), sistem pengendalian intern pemerintah (X_3), dan penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_4).

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel terikat atau tergantung yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (Anwar, 2014:50). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian lapangan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner (angket) yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap kepala bagian dan staf bagian keuangan/akuntansi pada SKPD. Menurut Umar (2009) dalam Rhintya (2016) metode kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respon atas daftar pertanyaan. Kuesioner yang diberikan berisi pernyataan-pernyataan yang disertai petunjuk dalam pengisian kuesioner sehingga akan memudahkan responden dalam mengisi kuesioner yang telah diberikan. Selain itu,

penjelasan juga akan secara langsung disampaikan kepada responden agar terdapat interaksi antara peneliti dengan responden dan hasil akhir dari pengisian kuesioner bisa langsung dikembalikan kepada peneliti.

Indikator penelitian yang digunakan dalam kuesioner ini merupakan adopsi penuh dari kuesioner penelitian Anggun (2016) dan Kristialihadi (2017). Karena variabel independen dalam penelitian Anggun (2016) hanya 2 (dua) yaitu kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga untuk variabel independen lainnya yaitu variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan indikator yang digunakan merupakan adopsi dari kuesioner penelitian Kriatialihadi (2017).

Peneliti membuat kuesioner menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, berupa prakata dari peneliti yang berisikan permohonan partisipasi dan kesediaan responden serta ucapan terima kasih. Bagian kedua, berisikan identitas dari responden. Identitas responden diperlukan untuk proses analisis data. Bagian ketiga yaitu berisikan butir-butir pernyataan tentang variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintahan, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner bersifat tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Jenis skala yang dipakai adalah skala *Likert* dengan skor atau diberi bobot nilai 1-5. Skala *Likert* merupakan metode mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ke-tidaksetujuan-nya terhadap subyek, obyek, atau kejadian tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2014). Menurut Ghozali (2013:17) skala *likert* tidak hanya digunakan untuk mengukur sikap tetapi juga digunakan untuk mengukur opini, personalitas dan menggambarkan kehidupan maupun lingkungan seseorang. Penilaian variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam kuesioner ini sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Skala Likert

No	Kategori Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi SDM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki PPK-SKPD di lingkungan Pemkab Jember dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam penatausahaan keuangan, dengan indikator keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*capability*) untuk melakukan sebuah pekerjaan. Indikator penilaian yang digunakan merupakan adopsi dari kuesioner penelitian Anggun (2016) yaitu: (1) pengetahuan yang dimiliki oleh Pimpinan/kepala SKPD dan Kepala bagian keuangan SKPD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan bidangnya; (2) keterampilan/kemampuan yang harus dimiliki; (3) perilaku/sikap kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Indriasari dan Nahrtyo, 2009). Peneliti melakukan penelitian seberapa besar pemanfaatan teknologi informasi oleh PPK-SKPD di Kabupaten Jember di dalam menyusun laporan keuangan serta mencatat transaksi-transaksinya. Indikator penilaian yang digunakan merupakan adopsi kuesioner dari penelitian Anggun

(2016) yaitu: a) kecukupan jumlah komputer; b) jaringan internet; c) pemanfaatan jaringan; d) penggunaan sistem komputerisasi; e) penggunaan software sesuai dengan perundang-undangan; f) laporan akuntansi yang diperoleh dari sistem informasi yang terintegrasi; g) pemeliharaan peralatan; dan h) perbaikan peralatan tepat waktu.

c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_3)

Menurut PP No. 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Indikator penilaian yang digunakan merupakan adopsi dari kuesioner Hafidah (2016) berupa unsur-unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

d. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_4)

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71, 2010). Penerapan SAP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan SAP oleh PPK-SKPD didalam menyusun laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP. Indikator penilaian yang digunakan merupakan adopsi dari kuesioner Amalia (2017) yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang terdiri atas 12 (dua belas) pernyataan standar.

e. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Laporan keuangan yang berkualitas menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Kualitas LKPD (Y) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan dengan indikator:

- Relevan, dengan sub indikator sebagai berikut: (1) memiliki manfaat umpan balik; (2) memiliki manfaat prediktif; (3) tepat waktu dan (4) lengkap.
- Andal, dengan sub indikator sebagai berikut: (1) penyajian jujur; (2) dapat diverifikasi serta (3) netralitas.
- Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
- Dapat dipahami oleh penggunaannya.

3.5 Analisis Data

Menurut Siregar (2013:85) dalam Rozi (2016) pada penelitian kuantitatif kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2014:147). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:206). Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian) dan koefisien

korelasi antar variabel penelitian. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan alat statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai identitas responden seperti jenis kelamin, jabatan, periode kerja, strata pendidikan dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian. Ukuran yang digunakan biasanya berupa nilai minimal, nilai maksimal, rata-rata dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Kualitas Data

Kesimpulan penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu: reliabilitas dan validitas.

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar dalam Rozi, 2013:46). Menurut Wiratna (2015:192) bahwa uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuai yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Tingkat validitas pada penelitian ini diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor konstruk menggunakan aplikasi SPSS dengan uji *coefficient correlation pearson*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor konstruk memiliki tingkat signifikansi di bawah 5% (0,05) maka butir tersebut dinyatakan valid.

Wiratna (2015:192) menjelaskan bahwa reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan *reliabel* atau handal jika jawaban pertanyaan pada kuisisioner adalah konsistensi atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran butir pertanyaan dengan sekali menyebar kuisisioner pada responden, kemudian hasil ukurnya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan

SPSS, dengan fasilitas *Cronbach's Alpha* (α). Suatu variabel dalam penelitian ini dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $> 60\%$ (Ghozali, 2011).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan ketepatan model yang dianalisis, perlu dilakukan pengujian atas beberapa persyaratan asumsi klasik yang mendasari model regresi. Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi linier berganda adalah terpenuhinya uji asumsi klasik. Masalah yang umum terjadi dalam model regresi linier berganda yaitu uji multikolinieritas, uji normalitas, dan uji heterokedastisitas, maka dilakukan uji asumsi klasik mengenai keberadaan masalah tersebut.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005). Untuk melihat normalitas adalah dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov Smirnov* (K-S). Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat kepercayaan 5% (*level significance*) maka model regresi memenuhi asumsi normal (Ghozali, 2011:58).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi, dapat dilihat dari *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2011:105).

3. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2011: 139), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dari tingkat signifikansi dapat digunakan *uji glejser* atau absolut residual dari data. Jika tingkat signifikansi berada diatas 5% berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi jika jika berada di bawah 5% berarti terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Sanusi (2014:144) menjelaskan bahwa uji hipotesis sama artinya dengan menguji signifikansi koefisien regresi linier berganda secara parsial yang sekait dengan pernyataan hipotesis penelitian. Lebih rincinya dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Regresi Linear Berganda

Data yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis linier berganda (*moderated regression anlysis*) dengan menggunakan program SPSS. Analisis regresi ini mempelajari bagaimana eratnya hubungan antara beberapa variabel independen dengan sebuah variabel dependen (Nazir, 2014:405). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Regresi linear berganda untuk penelitian ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

di mana:

Y = kualitas LKPD

X₁ = Kompetensi SDM

X₂ = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X₃ = SPIP

X₄ = Penerapan SAP

a = konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = koefisien regresi

e = variabel pengganggu (*error*)

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R^2) berarti semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2011:169) nilai R^2 terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu). Jika R^2 semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam variabel dependen, ini berarti semakin tepat garis regresi tersebut untuk mewakili hasil observasi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan jumlah variabel independen lebih dari 2 (dua).

c. Uji F (Uji Model)

Uji model dilakukan dengan menggunakan nilai F yaitu kelayakan yang harus dilakukan dalam analisis regresi linear. Jika uji F tidak signifikan maka tidak disarankan untuk melakukan uji t atau uji parsial. Uji ini dilakukan dengan menggunakan table ANOVA yang bertujuan menguji kelayakan model regresi yang digunakan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05. Ketentuan yang digunakan adalah berdasarkan probabilitas, yaitu:

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 tidak berhasil ditolak yang berarti bahwa model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 berhasil ditolak yang berarti bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Atau dapat menggunakan perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti bahwa model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima berarti bahwa model regresi tidak layak untuk digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2011:84).

Untuk mengetahui uji F atau uji simultan peneliti menggunakan bantuan program SPSS Statistics 24.

d. Uji t (Uji Hipotesis)

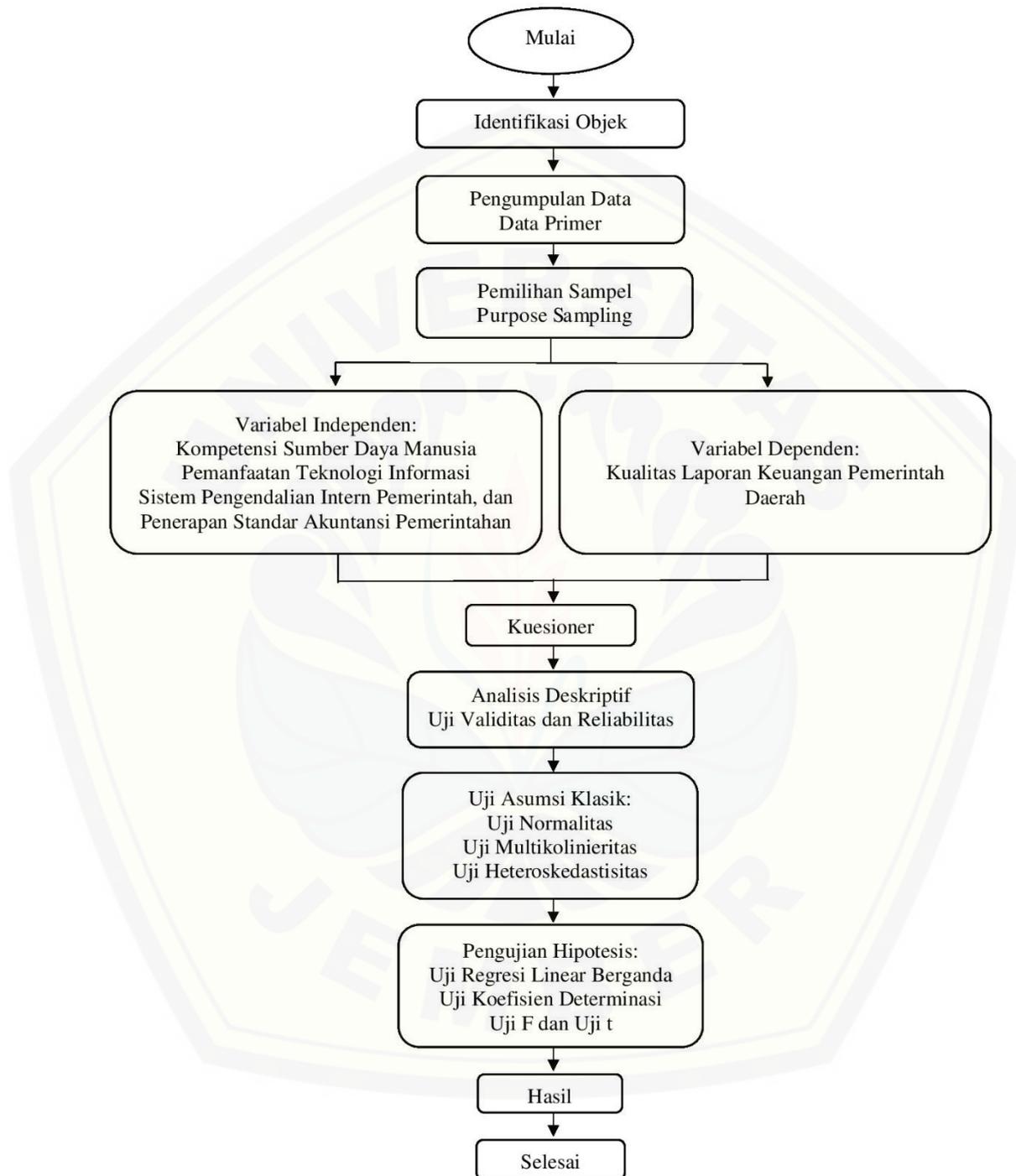
Uji signifikansi terhadap masing-masing koefisien regresi diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap t_{hitung} menggunakan rumus diatas, kemudian membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi (α) $< 0,05$ maka H_0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen ditolak. Ini berarti secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi (α) $> 0,05$ maka H_0 diterima, yang berarti secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:84).

Untuk mengetahui uji t peneliti menggunakan bantuan program SPSS Statistics 24.

3.6 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember, khususnya kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang diukur dengan melihat jawaban responden terhadap pernyataan atas masing-masing variabel dalam kuesioner yang diberikan. Penelitian ini mengambil sampel pada SKPD di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil dan analisis data penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga H_1 diterima atau terbukti kebenarannya. Hal ini memiliki makna bahwa dengan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia, meliputi pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan sikap/perilaku (*attitude*) maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat mengalami peningkatan juga.
2. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga H_2 diterima atau terbukti kebenarannya. Artinya, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik yang akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang akan meningkat. Dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi yang canggih dan modern, yang mampu memberikan keakuratan dalam hasil pelaporan, maka laporan keuangan khususnya pemerintah daerah memiliki kualitas yang tinggi.

3. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga H_3 diterima atau terbukti kebenarannya. Hal ini memiliki makna bahwa dengan menerapkan SPIP berdasarkan lima unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemanatauan yang tinggi akan menjamin tujuan organisasi tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan.
4. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga hipotesis H_4 diterima atau terbukti kebenarannya. Hal ini memiliki makna bahwa penerapan SAP yang tinggi menjamin bahwa laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan standar yang berlaku dan memenuhi kriteria informasi keuangan yang berguna bagi penggunaannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini kemungkinan mempunyai *lineancy bias* yaitu adanya kecenderungan responden untuk memberikan skor jawaban yang lebih tinggi terhadap skor jawaban yang sebenarnya terjadi, karena ada beberapa responden yang menolak untuk bertatap langsung dengan peneliti.
2. Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen namun hasilnya masih terdapat 12,8 % kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor lain.
3. Objek dalam penelitian ini adalah SKPD di Kabupaten Jember dimana SKPD merupakan entitas akuntansi bukan merupakan entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan yang dibuat tidak serinci entitas pelaporan.

5.3 Saran

Mengacu pada hasil kesimpulan dan pembahasan di atas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya membagikan kuesioner tersebut kemudian menunggunya agar meminimalisir *lineancy bias*.
2. Sebagai acuan penelitian yang akan datang dengan tema sejenis diharapkan untuk menambah/mengganti dengan variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti sistem akuntansi keuangan daerah, komitmen organisasi dll.
3. Penelitian selanjutnya yang memilih tema yang serupa, sebaiknya objek yang digunakan adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini adalah BPKAD di Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Kharis. 2010. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada PT. AVIA AVIAN. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.
- Amalia, R.N. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember). Tidak Diterbitkan. Skripsi. Universitas Jember.
- Anatan, L. dan L. Ellitan. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Bisnis Modern*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Anggun F.M, Rhintya. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Jember. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Universitas Jember.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*. <https://www.Surabaya.bpk.go.id> (diakses tanggal 13 Desember 2017)
- Erlina, Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah: Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Febrian. 2014. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas Sumber Daya manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi empiris pada satker Kementerian Agama di Jawa Timur). Tidak Diterbitkan Skripsi. Universitas Jember.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Hafidah, Nur. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Universitas Jember.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hanggono, AA., Handayani, SR., dan Susilo, Heru. 2015. Analisis Atas Praktek TAM (Technology Acceptance Model) Dalam Mendukung Bisnis Online Dengan Memanfaatkan Jejaring Sosial. *Jurnal Admistrasi Bisnis (JAB)/Vol. 26 No. 1.*
- Hariadi, P., Restianto, Y.E., dan Icu. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Indriani, Eka. 2017. Teknologi Informasi dalam Bidang Akuntansi. <http://ilmuti.org/wp-content/uploads/2017/03/Eka-Indriani-Teknologi-Informasi-Dalam-Bidang-Akuntansi.pdf> (diakses tanggal 8 Maret 2018)
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen.* Yogyakarta.
- Indriasari, D., dan Nahrtyo, E. 2009. Pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Jember). Tidak Diterbitkan. Skripsi. Universitas Jember.
- Kristaliahadi, Y.G. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD di Kabupaten Situbondo). Tidak Diterbitkan. Skripsi. Universitas Jember.
- Lauma, E.B, dkk. 2015. Analisis Penerapan Standar Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Lubbe, J.C.A. Van Der dan Nauta, D. (1992). "Peircean semiotics, culture and expert systems." *Int. Forum Information and Documentation.* Vol. 17(3) July 1992. p. 3-10.
- Marsdiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muzakki, M.R. 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris terhadap SKPD di Kabupaten Bondowoso). Tidak Diterbitkan. Skripsi. Universitas Jember.
- Nasution, FM. 2004. Penggunaan Teknologi Informasi Berdasarkan Aspek Perilaku (Behavioral Aspect). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Nazir, Moh., 2014. *Metode Penelitian.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Noerdiawan, D., Putra, L. S., dan Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember. kabjember.jdih.jatimprov.go.id (diakses tanggal 7 Februari 2018)
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. www.bpkp.go.id (diakses tanggal 15 Desember 2017)
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010. *Sistem Informasi Keuangan Daerah*. keuda.kemendagri.go.id (diakses tanggal 15 Desember 2017)
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010. *Sistem Informasi Keuangan Daerah*. keuda.kemendagri.go.id (diakses tanggal 7 Februari 2018)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. www.djpk.depkeu.go.id (diakses tanggal 15 Desember 2017)
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. www.djpk.depkeu.go.id (diakses tanggal 13 Desember 2017)
- Purwati, A.S. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM di Kabupaten Banyumas. Artikel: Universitas Jenderal Soedirman.
- Riswanto, Natak. 2016. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Universitas Jember.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudiarianti, N.M. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVIII.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.

- Sumarsan, Thomas. 2013. *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta Barat: PT. Indeks.
- Susilowati dan Riana, D.S. 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal STEI STEMBI Bandung*.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual: Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. <https://kemenag.go.id> (diakses tanggal 7 Februari 2018)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*. www.bpk.go.id (diakses tanggal 23 Desember 2017)
- Website Resmi Pemerintah Kabupaten Jember. <https://Jemberkab.go.id> (diakses tanggal 25 Januari 2018)
- Wilkinson, Joseph W. 1995. *Sistem Akuntansi dan Informasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Winidyaningrum, C., dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi, XIII, Purwokerto.
- Zamzami F, Mukhlis, dan Pramesti A.E. 2014. *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Kudus: Fakultas Ekonomi Universitas Maria Kudus.

Lampiran 1

KUISIONER PENELITIAN
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Jember)

Saya adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember yang sedang melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Jember)”**.

Data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan merupakan hal yang sangat berharga, oleh karena itu partisipasi dan kesediaan Bapak/Ibu dalam menjawab kuisisioner ini sangat saya hargai. Data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan akan saya jamin kerahasiaan dan semata-mata digunakan untuk kegiatan ilmiah.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuisisioner ini.

Hormat saya,

Khoiriana

KUISIONER PENELITIAN
PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Jember)

IDENTITAS RESPONDEN

1. No Responden : (diisi oleh peneliti)
2. Nama :
3. Pangkat/ Gol. :
4. Instansi :
5. Jenis Kelamin*) : Pria/Wanita
6. Nama SKPD :
7. Lama Menjabat*) : <1 tahun/ 1-5 tahun/ >5 tahun
8. Pendidikan Terakhir*): SMA/D3/D4/S1/S2/S3 Jurusan
9. Pernahkah Bapak/Ibu/Sdr. membuat laporan keuangan? *): Pernah/Tidak Pernah

*) Coret yang tidak sesuai

PERTANYAAN TENTANG KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

CARA PENGISIAN KUISIONER

Mohon Bapak/Ibu/Sdr. memberikan tanda check list/centang (√) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia dalam kolom pernyataan dengan kriteria sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

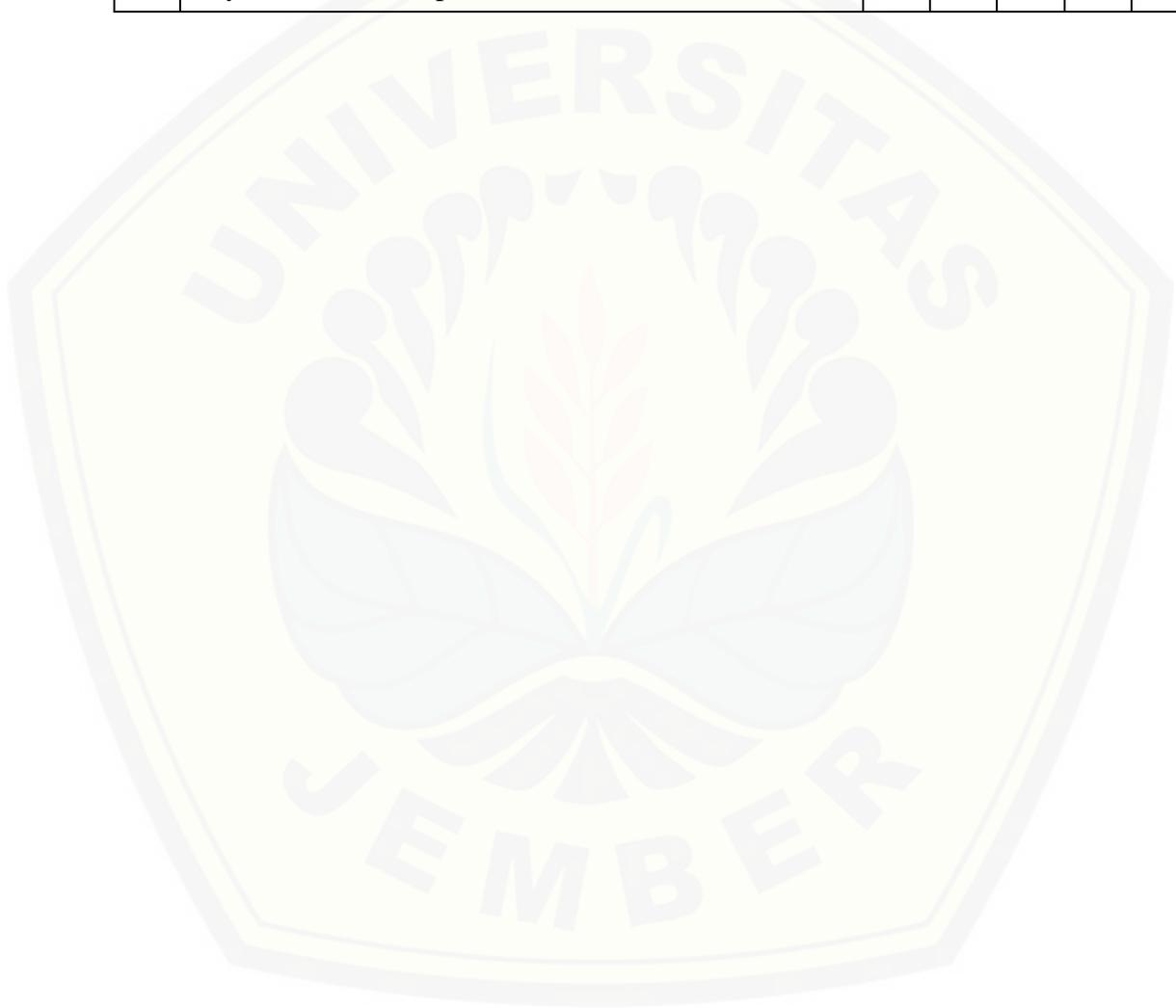
S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

N = Netral

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
A	Pengetahuan (<i>knowledge</i>)					
1	Saya memahami teori yang bersangkutan dengan pekerjaan saya dengan baik					
2	Saya memahami pengetahuan yang semua aturan yang berkaitan terhadap pekerjaan dengan baik					
3	Saya memiliki pengetahuan dalam hal pelayanan yang baik dalam bidang pekerjaan yang saya lakukan					
4	Saya dapat berpikir kreatif dalam melaksanakan pekerjaan					
5	Saya dapat memberikan ide yang baik dalam bekerja					
B	Keahlian (<i>Skill</i>)					
6	Saya mampu bekerjasama dengan baik dengan rekan kerja					
7	Saya mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam pekerjaan					
8	Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan rekan kerja					
9	Semakin besar beban tugas yang diberikan instansi kepada saya semakin besar tanggungjawab yang saya terima					
C	Perilaku (<i>Attitude</i>)					
10	Saya selalu melaksanakan pekerjaan tepat waktu					

11	Saya dapat mematuhi norma-norma sosial dalam melaksanakan pekerjaan					
12	Saya dapat melaksanakan pekerjaan dengan kualitas kerja yang baik					
13	Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosedur.					
14	Saya dapat bekerjasama memenuhi aturan-aturan yang berlaku di dalam pekerjaan saya					
15	Saya selalu hadir tepat waktu					



PERTANYAAN TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

CARA PENGISIAN KUISIONER

Mohon Bapak/Ibu/Sdr. memberikan tanda check list/centang (√) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia dalam kolom pernyataan dengan kriteria sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

N = Netral

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Dalam melaksanakan tugas subbagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup.					
2	Jaringan internet terpasang di unit kerja secara <i>Local Area Network (LAN)</i> atau <i>Wide Area Network (WAN)</i> .					
3	Jaringan internet terpasang dan dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.					
4	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.					
5	Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
6	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.					
7	Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.					
8	Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.					

PERTANYAAN TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH

CARA PENGISIAN KUISIONER

Mohon Bapak/Ibu/Sdr. memberikan tanda check list/centang (√) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia dalam kolom pernyataan dengan kriteria sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

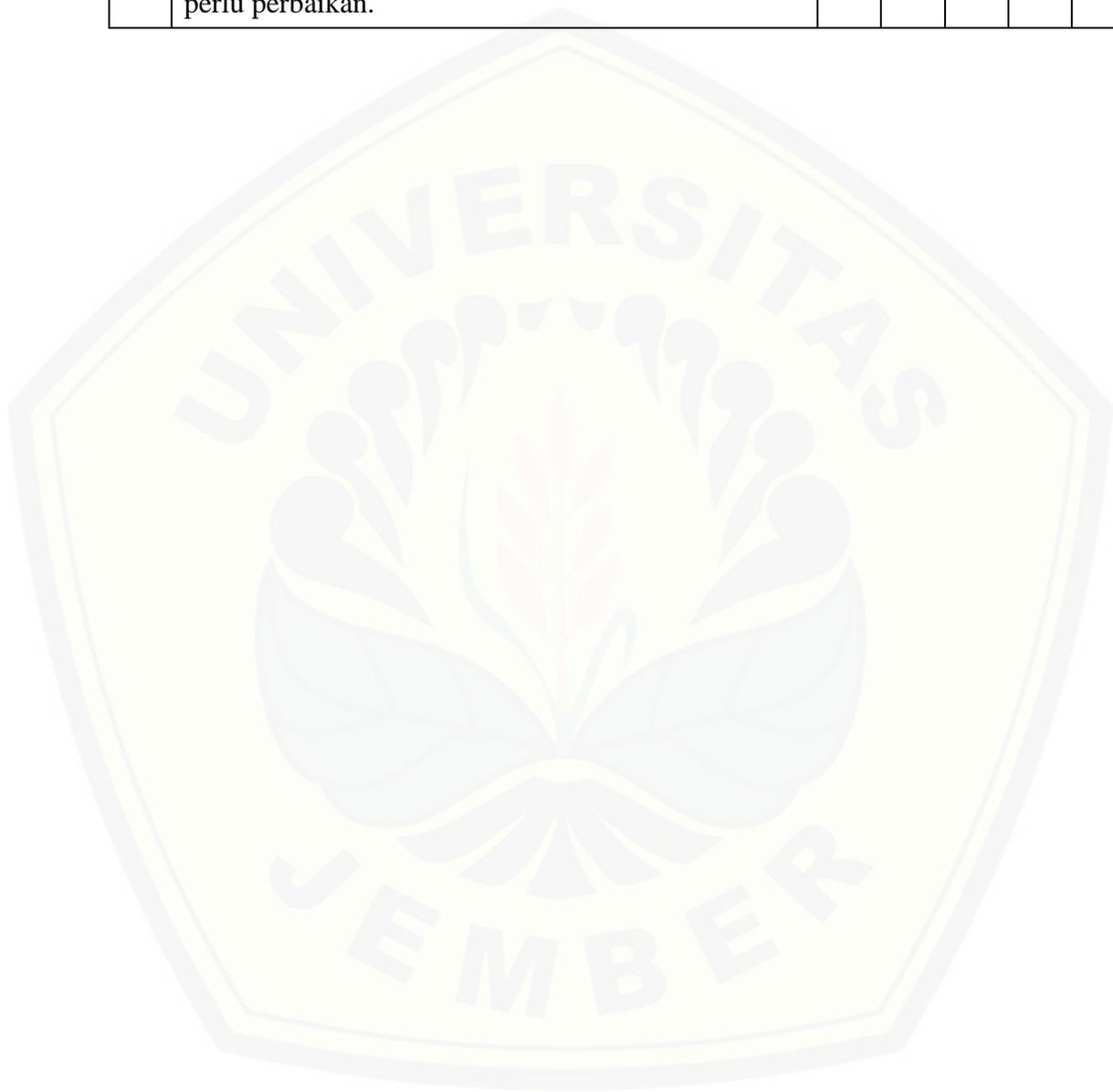
S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

N = Netral

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Pegawai dan atasan telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian.					
2	Pimpinan selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai.					
3	Pimpinan telah memberikan wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.					
4	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.					
5	Semua transaksi yang dientri dan diproses ke dalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi.					
6	Pengeluaran uang pada SKPD telah didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas yang telah diberi nomor urut tercetak.					
7	Instansi Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset.					
8	Peralatan dan persediaan disimpan di tempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan.					

9	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat.					
10	Pimpinan selalu mereview dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.					



PERTANYAAN TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

CARA PENGISIAN KUISIONER

Mohon Bapak/Ibu/Sdr. memberikan tanda check list/centang (√) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia dalam kolom pernyataan dengan kriteria sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

N = Netral

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
A	PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan					
1	Saya selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui aset.					
2	Saya selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui pendapatan dan beban.					
3	Saya selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui kewajiban dan ekuitas.					
B	PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran					
4	Saya selalu menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan akuntansi berbasis kas.					
5	Saya selalu mencatat pendapatan-LRA berdasarkan asas bruto.					
6	Saya telah mengakui belanja saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.					
7	Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada rekening kas umum daerah.					
C	PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas					
8	Saya selalu menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).					
9	Saya selalu menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.					

D	PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan				
10	Saya selalu menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada setiap periode pelaporan.				
11	CaLK SKPD yang saya susun selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan.				
E	PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan				
12	Saya selalu mengakui persediaan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.				
13	Pencatatan persediaan selalu dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi.				
F	PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi				
14	Saya selalu mengakui kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi setelah manfaat ekonomi potensi di masa yang akan datang diukur.				
15	Saya selalu menggunakan metode biaya untuk penilaian investasi atas kepemilikan kurang dari 20%.				
16	Saya selalu menggunakan metode ekuitas untuk penilaian investasi atas kepemilikan lebih dari 50%.				
17	Saya selalu menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan untuk penilaian investasi atas kepemilikan nonpermanen.				
G	PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap				
18	Saya selalu mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas.				
19	Saya selalu mencatat/menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya.				
H	PSAP No. 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan				
20	Saya selalu mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi.				
21	Saya selalu memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.				
I	PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban				
22	Saya selalu mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.				

23	Saya selalu mencatat kewajiban sebesar nilai nominal.					
J	PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan					
24	Saya selalu melakukan koreksi terhadap setiap kesalahan yang ditemukan berdasarkan SAP.					
25	Saya selalu mengkoreksi kesalahan yang tidak berulang melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.					
K	PSAP No. 10 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian					
26	Saya selalu menyajikan laporan keuangan konsolidasian untuk periode pelaporan yang sama dengan pelaporan entitas pelaporan dan berisi jumlah komperatif dengan periode sebelumnya.					
27	Laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan selalu mencakup laporan keuangan dari semua entitas akuntansi.					
L	PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional					
28	Laporan Operasional menyajikan informasi beban yang harus ditanggung untuk menjalankan pelayanan dan juga memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk membiayai kegiatan.					
29	Pendapatan-LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.					
30	Beban diakui saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daera, terjadinya konsumsi aset, serta terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.					

PERTANYAAN TENTANG KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

CARA PENGISIAN KUISIONER

Mohon Bapak/Ibu/Sdr. memberikan tanda check list/centang (√) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia dalam kolom pernyataan dengan kriteria sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

N = Netral

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
A	Relevan					
1	Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.					
2	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna di masa lalu (<i>feedback value</i>).					
3	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang (<i>predictive value</i>).					
4	Laporan keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.					
5	Informasi dalam laporan keuangan dibuat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.					
B	Andal					
6	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
7	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
8	Informasi yang disajikan oleh SKPD teruji kebenarannya					

9	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah.					
10	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.					
C	Dapat Dibandingkan					
11	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya					
12	SKPD menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.					
13	SKPD menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.					
D	Dapat Dipahami					
14	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD secara jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna.					
15	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					
16	Laporan keuangan disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.					

Lampiran 2

Daftar Responden

No	L/P	Lama Menjabat	Pendidikan	SKPD
1	Perempuan	> 5 tahun	S1	Bagian Hukum
2	Perempuan	> 5 tahun	D3	Bagian Humas & Protokol
3	Laki-laki	1-5 tahun	S1	Bagian Bina Mental
4	Perempuan	> 5 tahun	S1	Bagian Organisasi
5	Laki-laki	> 5 tahun	S1	Bagian Pembangunan
6	Perempuan	> 5 tahun	S2	Bagian Tata Pemerintahan
7	Perempuan	> 5 tahun	S1	Bagian Perekonomian
8	Laki-laki	1-5 tahun	SMA	Bagian Umum
9	Perempuan	> 5 tahun	S1	Bagian Umum
10	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Perempuan	> 5 tahun	S2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Laki-laki	> 5 tahun	S1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga
13	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Keluarga
14	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Lingkungan Hidup
15	Laki-laki	1-5 tahun	S1	Dinas Lingkungan Hidup
16	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Tenaga Kerja
17	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Tenaga Kerja
18	Laki-laki	> 5 tahun	SMA	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
19	Laki-laki	> 5 tahun	SMA	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
20	Perempuan	1-5 tahun	S1	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
21	Perempuan	1-5 tahun	S1	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
22	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
23	Laki-laki	1-5 tahun	S1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

24	Perempuan	> 5 tahun	S2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25	Laki-laki	> 5 tahun	D3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
26	Laki-laki	> 5 tahun	S1	Dinas Koperasi
27	Laki-laki	> 5 tahun	S1	Dinas Koperasi
28	Perempuan	> 5 tahun	S1	Badan Pendapatan Daerah
29	Perempuan	> 5 tahun	S2	Badan Pendapatan Daerah
30	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Pendidikan
31	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Pendidikan
32	Perempuan	1-5 tahun	D3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33	Laki-laki	1-5 tahun	D4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34	Perempuan	> 5 tahun	D3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA
35	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA
36	Laki-laki	1-5 tahun	S1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
37	Perempuan	> 5 tahun	SMA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
38	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Perikanan
39	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Perikanan
40	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
41	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
42	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Kesehatan
43	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Kesehatan
44	Perempuan	> 5 tahun	S1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
45	Perempuan	1-5 tahun	S1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
46	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
47	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
48	Laki-laki	1-5 tahun	S1	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
49	Laki-laki	> 5 tahun	S1	Badan Kesatuan Bangsa, Politik
50	Laki-laki	> 5 tahun	S1	Satuan Polisi Pamong Praja
51	Laki-laki	> 5 tahun	SMA	Satuan Polisi Pamong Praja
52	Perempuan	> 5 tahun	S1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

53	Perempuan	> 5 tahun	S1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
54	Perempuan	1-5 tahun	D3	Dinas Komunikasi dan Informatika
55	Laki-laki	1-5 tahun	S1	Dinas Komunikasi dan Informatika
56	Perempuan	> 5 tahun	S1	Badan Pengeolaan Keuangan Aset Daerah
57	Perempuan	1-5 tahun	D3	Badan Pengeolaan Keuangan Aset Daerah
58	Laki-laki	> 5 tahun	S1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
59	Perempuan	> 5 tahun	S2	Dinas Perhubungan
60	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Perhubungan
61	Perempuan	> 5 tahun	SMA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
62	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
63	Perempuan	> 5 tahun	S1	Dinas Sosial
64	Laki-laki	> 5 tahun	S1	Dinas Sosial

19	5	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
20	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	66
21	4	3	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	65
22	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	63
23	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58
24	4	4	4	5	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	60
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
26	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	62
27	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	63
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	59
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	59
30	4	4	4	4	4	5	3	4	4	3	4	4	3	4	3	57
31	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	55
32	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	68
33	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	68
34	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	58
35	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	58
36	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	61
37	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	61
38	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	66
39	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	68
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
41	4	4	3	5	3	5	4	5	4	3	4	4	4	4	4	60
42	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	4	59

43	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	57
44	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	5	4	4	4	3	58
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	58
46	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	53
47	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	52
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	59
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	58
50	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	5	4	5	3	62
51	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
52	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	58
54	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
55	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	55
56	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63
57	4	4	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	60
58	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	59
59	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	55
60	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	62
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	58
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	58
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	59
64	4	4	4	3	3	4	3	4	4	5	5	4	4	4	4	59

Tabel Tabulasi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)									
Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	4	4	4	4	4	4	3	3	30
4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	4	4	3	4	4	4	3	3	29
6	4	4	4	4	5	5	4	4	34
7	4	4	4	4	4	4	4	4	32
8	4	4	4	4	5	4	4	4	33
9	4	4	4	4	4	4	4	3	31
10	5	4	4	5	4	4	4	3	33
11	5	5	5	5	5	5	5	5	40
12	4	3	4	4	4	4	4	4	31
13	5	4	4	4	4	4	4	4	33
14	5	5	5	4	4	4	4	4	35
15	5	5	5	4	4	4	4	4	35
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32
17	4	4	3	4	4	4	3	3	29
18	5	4	5	4	4	4	4	4	34
19	5	5	5	5	4	4	4	3	35
20	5	5	5	5	5	5	2	2	34
21	5	4	5	5	5	5	2	3	34
22	5	4	4	4	4	4	4	4	33
23	5	4	4	4	4	4	4	4	33
24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
25	4	4	4	4	4	4	3	3	30
26	4	4	4	4	4	4	3	3	30
27	4	5	5	5	5	4	4	4	36
28	4	4	4	4	4	4	4	3	31
29	5	5	5	4	4	4	3	3	33
30	4	4	4	4	4	4	3	3	30
31	4	4	4	4	4	4	4	3	31
32	5	5	4	4	4	4	4	4	34
33	5	5	5	4	4	4	4	3	34
34	4	4	4	4	4	4	3	4	31
35	4	4	4	4	4	4	3	4	31
36	4	4	4	4	4	4	4	4	32
37	5	5	4	4	4	4	3	3	32
38	4	4	5	5	5	4	5	5	37

Tabel Tabulasi Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)											
Responden	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	Total
1	5	5	4	4	4	4	3	4	4	3	40
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	2	35
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	36
6	5	4	4	4	5	5	4	3	4	4	42
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	39
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
10	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	44
11	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
12	4	5	4	3	4	5	4	3	4	4	40
13	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	42
14	4	4	5	5	4	4	4	4	2	4	40
15	5	5	5	5	4	4	4	4	2	4	42
16	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	38
17	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	37
18	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
19	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	42
20	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	42
21	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	42
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
26	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
27	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	44
28	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	40
29	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	40
30	4	4	4	4	4	5	3	3	3	4	38
31	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	38
32	5	5	4	3	3	4	5	4	4	3	40
33	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	44
34	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
35	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
37	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
38	4	5	5	5	3	4	5	5	5	5	46
39	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	45

40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
41	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	37
42	4	4	4	4	5	5	4	4	3	3	40
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
44	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	39
45	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
46	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	34
47	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	32
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
50	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	43
51	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	42
52	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	38
53	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
55	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
56	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	44
57	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
58	4	5	5	5	4	4	4	4	3	4	42
59	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	37
60	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	46
61	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	37
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
64	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39

Tabel Tabulasi Variabel Kualitas LKPD (Y)																	
Responden	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15	Y.16	Total
1	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	61
2	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	59
4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
5	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
6	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	67
7	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	65
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63
10	5	5	5	3	5	5	5	3	5	5	4	4	4	5	2	5	70
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	78
12	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	62
13	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70
14	4	4	4	4	3	3	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	69
15	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	70
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63
17	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	55
18	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	66
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	68
20	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	70
21	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	71
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63

Lampiran 4

Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁)

Correlations																	
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.690**	.612**	.309*	.327**	.238	.289*	.366**	.255*	.194	.028	.219	.069	.365**	.305*	.642**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.013	.008	.059	.021	.003	.042	.124	.825	.082	.587	.003	.014	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X1.2	Pearson Correlation	.690**	1	.578**	.071	.092	.179	.251*	.149	.033	.017	-.024	.265*	-.012	.084	.159	.412**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.578	.470	.156	.046	.241	.793	.891	.852	.034	.927	.508	.210	.001
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X1.3	Pearson Correlation	.612**	.578**	1	.370**	.442**	.208	.248*	.202	.146	.165	.081	.116	.098	.085	.200	.554**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.003	.000	.099	.048	.110	.249	.192	.526	.360	.443	.506	.112	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X1.4	Pearson Correlation	.309*	.071	.370**	1	.778**	.444**	.253*	.274*	.235	.201	.100	.099	.093	.255*	.320**	.626**
	Sig. (2-tailed)	.013	.578	.003		.000	.000	.043	.029	.061	.111	.431	.438	.464	.042	.010	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X1.5	Pearson Correlation	.327**	.092	.442**	.778**	1	.426**	.332**	.194	.305*	.278*	.032	.118	.016	.225	.180	.620**
	Sig. (2-tailed)	.008	.470	.000	.000		.000	.007	.124	.014	.026	.802	.351	.902	.074	.154	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X1.6	Pearson Correlation	.238	.179	.208	.444**	.426**	1	.455**	.550**	.409**	.183	.019	.088	-.041	.338**	.422**	.635**
	Sig. (2-tailed)	.059	.156	.099	.000	.000		.000	.000	.001	.148	.879	.488	.746	.006	.001	.000

	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X1.7	Pearson Correlation	.289*	.251*	.248*	.253*	.332**	.455**	1	.440**	.332**	.332**	-.058	.123	.328**	.222	.315*	.606**
	Sig. (2-tailed)	.021	.046	.048	.043	.007	.000		.000	.007	.007	.648	.332	.008	.078	.011	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X1.8	Pearson Correlation	.366**	.149	.202	.274*	.194	.550**	.440**	1	.570**	.120	.063	.118	.217	.174	.300*	.577**
	Sig. (2-tailed)	.003	.241	.110	.029	.124	.000	.000		.000	.344	.622	.352	.086	.168	.016	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X1.9	Pearson Correlation	.255*	.033	.146	.235	.305*	.409**	.332**	.570**	1	.367**	.236	.317*	.375**	.341**	.285*	.624**
	Sig. (2-tailed)	.042	.793	.249	.061	.014	.001	.007	.000		.003	.060	.011	.002	.006	.023	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X1.10	Pearson Correlation	.194	.017	.165	.201	.278*	.183	.332**	.120	.367**	1	.339**	.338**	.419**	.345**	.298*	.547**
	Sig. (2-tailed)	.124	.891	.192	.111	.026	.148	.007	.344	.003		.006	.006	.001	.005	.017	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X1.11	Pearson Correlation	.028	-.024	.081	.100	.032	.019	-.058	.063	.236	.339**	1	.549**	.492**	.324**	.057	.317*
	Sig. (2-tailed)	.825	.852	.526	.431	.802	.879	.648	.622	.060	.006		.000	.000	.009	.657	.011
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X1.12	Pearson Correlation	.219	.265*	.116	.099	.118	.088	.123	.118	.317*	.338**	.549**	1	.362**	.332**	.042	.423**
	Sig. (2-tailed)	.082	.034	.360	.438	.351	.488	.332	.352	.011	.006	.000		.003	.007	.741	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X1.13	Pearson Correlation	.069	-.012	.098	.093	.016	-.041	.328**	.217	.375**	.419**	.492**	.362**	1	.409**	.275*	.439**
	Sig. (2-tailed)	.587	.927	.443	.464	.902	.746	.008	.086	.002	.001	.000	.003		.001	.028	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X1.14	Pearson Correlation	.365**	.084	.085	.255*	.225	.338**	.222	.174	.341**	.345**	.324**	.332**	.409**	1	.518**	.604**
	Sig. (2-tailed)	.003	.508	.506	.042	.074	.006	.078	.168	.006	.005	.009	.007	.001		.000	.000

Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₂)

Correlations										
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.577**	.461**	.291*	.264*	.359**	.183	.147	.643**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.019	.035	.004	.147	.246	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X2.2	Pearson Correlation	.577**	1	.600**	.258*	.222	.173	.033	.026	.556**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.040	.078	.173	.794	.839	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X2.3	Pearson Correlation	.461**	.600**	1	.363**	.274*	.264*	.119	.224	.652**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.003	.028	.035	.347	.075	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X2.4	Pearson Correlation	.291*	.258*	.363**	1	.664**	.588**	.143	.120	.647**
	Sig. (2-tailed)	.019	.040	.003		.000	.000	.258	.344	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X2.5	Pearson Correlation	.264*	.222	.274*	.664**	1	.791**	.165	.193	.657**
	Sig. (2-tailed)	.035	.078	.028	.000		.000	.194	.126	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X2.6	Pearson Correlation	.359**	.173	.264*	.588**	.791**	1	-.009	.080	.561**
	Sig. (2-tailed)	.004	.173	.035	.000	.000		.941	.527	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X2.7	Pearson Correlation	.183	.033	.119	.143	.165	-.009	1	.719**	.584**
	Sig. (2-tailed)	.147	.794	.347	.258	.194	.941		.000	.000

Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X₃)

Correlations												
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	Total
X3.1	Pearson Correlation	1	.534**	.388**	.344**	.212	.109	.228	.162	.066	.445**	.626**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.005	.092	.391	.070	.202	.604	.000	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X3.2	Pearson Correlation	.534**	1	.669**	.472**	.066	.030	.335**	.225	.040	.302*	.644**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.606	.816	.007	.074	.751	.015	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X3.3	Pearson Correlation	.388**	.669**	1	.731**	.196	.100	.247*	.225	.001	.430**	.700**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000	.121	.433	.049	.074	.994	.000	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X3.4	Pearson Correlation	.344**	.472**	.731**	1	.285*	.117	.183	.336**	-.080	.464**	.674**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000		.022	.358	.147	.007	.530	.000	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X3.5	Pearson Correlation	.212	.066	.196	.285*	1	.267*	.209	.026	.080	.121	.415**
	Sig. (2-tailed)	.092	.606	.121	.022		.033	.097	.840	.530	.341	.001
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X3.6	Pearson Correlation	.109	.030	.100	.117	.267*	1	.131	-.096	.100	.132	.324**
	Sig. (2-tailed)	.391	.816	.433	.358	.033		.303	.449	.432	.299	.009
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X3.7	Pearson Correlation	.228	.335**	.247*	.183	.209	.131	1	.328**	.261*	.398**	.606**
	Sig. (2-tailed)	.070	.007	.049	.147	.097	.303		.008	.037	.001	.000

Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Correlations																		
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	Y.12	Y.13	Y.14	Y.15	Y.16	Total	
Y.1	Pearson Correlation	1	.692**	.497**	.093	.380**	.261*	.276*	.049	.242	.199	.075	.286*	.164	.556**	.087	.427**	.605**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.462	.002	.038	.028	.703	.054	.115	.556	.022	.197	.000	.494	.000	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Y.2	Pearson Correlation	.692**	1	.689**	.277*	.499**	.362**	.322**	-.107	.231	.311*	.207	.146	.267*	.353**	.161	.308*	.668**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.027	.000	.003	.009	.398	.066	.012	.100	.250	.033	.004	.204	.013	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Y.3	Pearson Correlation	.497**	.689**	1	.413**	.636**	.310*	.274*	-.007	.196	.417**	.281*	.293*	.368**	.220	.171	.193	.694**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.000	.013	.028	.954	.121	.001	.025	.019	.003	.080	.178	.128	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Y.4	Pearson Correlation	.093	.277*	.413**	1	.596**	.086	.091	.228	-.007	.307*	.232	.094	.064	.085	.075	.124	.450**
	Sig. (2-tailed)	.462	.027	.001		.000	.501	.477	.070	.954	.014	.065	.462	.614	.502	.555	.327	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Y.5	Pearson Correlation	.380**	.499**	.636**	.596**	1	.566**	.436**	.000	.129	.441**	.229	.131	.198	.186	-.105	.163	.653**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000		.000	.000	1.000	.308	.000	.069	.304	.117	.141	.410	.199	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Y.6	Pearson Correlation	.261*	.362**	.310*	.086	.566**	1	.609**	.171	.260*	.275*	.097	.163	.088	.216	-.018	.133	.529**
	Sig. (2-tailed)	.038	.003	.013	.501	.000		.000	.176	.038	.028	.446	.199	.489	.087	.890	.296	.000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Y.7	Pearson Correlation	.276*	.322**	.274*	.091	.436**	.609**	1	.267*	.416**	.359**	.185	.243	.093	.228	-.076	.140	.545**

	Sig. (2-tailed)	.028	.009	.028	.477	.000	.000		.033	.001	.004	.142	.053	.464	.070	.552	.269	.000	
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Y.8	Pearson Correlation	.049	-.107	-.007	.228	.000	.171	.267*	1	.417**	.284*	.344**	.489**	.049	.271*	.184	.151	.377**	
	Sig. (2-tailed)	.703	.398	.954	.070	1.000	.176	.033		.001	.023	.005	.000	.700	.030	.145	.235	.002	
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Y.9	Pearson Correlation	.242	.231	.196	-.007	.129	.260*	.416**	.417**	1	.583**	.509**	.531**	.216	.421**	.121	.298*	.578**	
	Sig. (2-tailed)	.054	.066	.121	.954	.308	.038	.001	.001		.000	.000	.000	.086	.001	.342	.017	.000	
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Y.10	Pearson Correlation	.199	.311*	.417**	.307*	.441**	.275*	.359**	.284*	.583**	1	.730**	.600**	.347**	.420**	.168	.435**	.740**	
	Sig. (2-tailed)	.115	.012	.001	.014	.000	.028	.004	.023	.000		.000	.000	.005	.001	.185	.000	.000	
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Y.11	Pearson Correlation	.075	.207	.281*	.232	.229	.097	.185	.344**	.509**	.730**	1	.626**	.319*	.224	.283*	.196	.574**	
	Sig. (2-tailed)	.556	.100	.025	.065	.069	.446	.142	.005	.000	.000		.000	.010	.075	.023	.120	.000	
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Y.12	Pearson Correlation	.286*	.146	.293*	.094	.131	.163	.243	.489**	.531**	.600**	.626**	1	.354**	.395**	.272*	.345**	.620**	
	Sig. (2-tailed)	.022	.250	.019	.462	.304	.199	.053	.000	.000	.000	.000		.004	.001	.029	.005	.000	
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Y.13	Pearson Correlation	.164	.267*	.368**	.064	.198	.088	.093	.049	.216	.347**	.319*	.354**	1	.235	.232	.134	.442**	
	Sig. (2-tailed)	.197	.033	.003	.614	.117	.489	.464	.700	.086	.005	.010	.004		.061	.065	.290	.000	
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Y.14	Pearson Correlation	.556**	.353**	.220	.085	.186	.216	.228	.271*	.421**	.420**	.224	.395**	.235	1	.252*	.673**	.624**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.080	.502	.141	.087	.070	.030	.001	.001	.075	.001	.061		.045	.000	.000	
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Y.15	Pearson Correlation	.087	.161	.171	.075	-.105	-.018	-.076	.184	.121	.168	.283*	.272*	.232	.252*	1	.277*	.335**	

Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.838	.836	15

Hasil Uji Reliabilitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.746	.771	8

Hasil Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_3)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.756	.756	10

Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_4)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.936	.938	30

Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.852	.857	16

Lampiran 5

Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

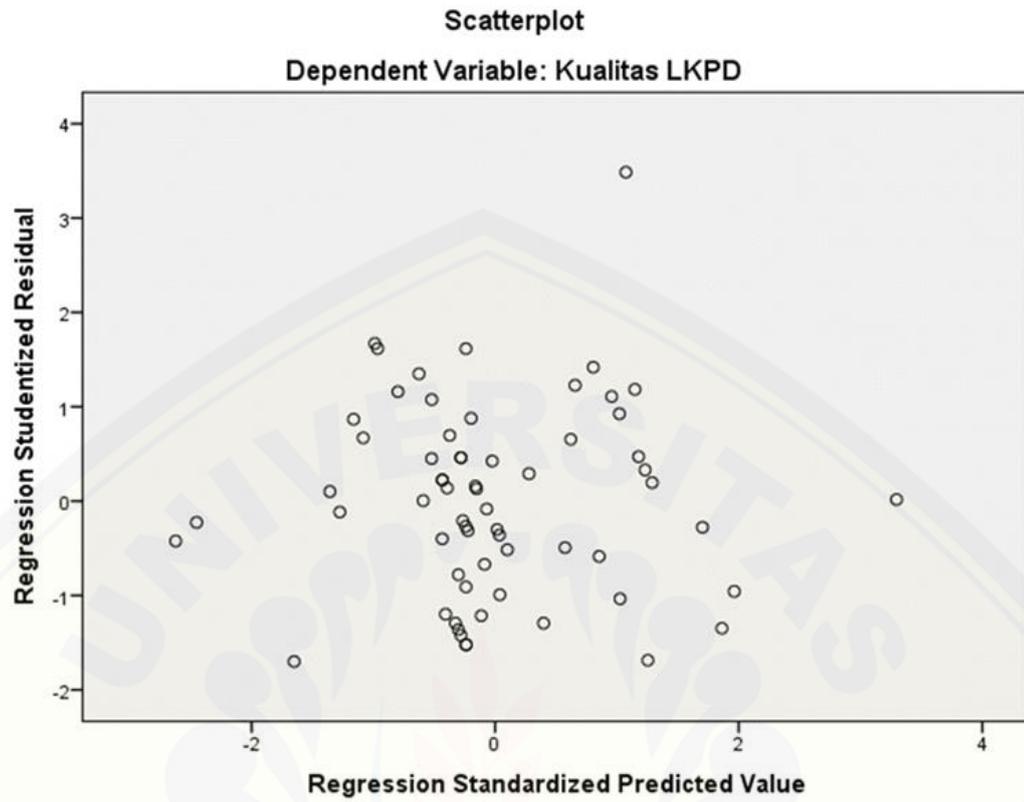
		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.57731498
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.053
	Negative	-.047
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.801	3.294		.547	.586		
	Kompetensi SDM	.346	.108	.302	3.196	.002	.244	4.106
	Pemanfaatan TI	.533	.165	.302	3.231	.002	.248	4.027
	SPIP	.359	.154	.228	2.328	.023	.227	4.403
	SAP	.088	.040	.183	2.170	.034	.306	3.269

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD



Lampiran 6

Regresi**Variables Entered/Removed^a**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SAP, Pemanfaatan TI, Kompetensi SDM, SPIP ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.934 ^a	.872	.863	1.630	1.567

a. Predictors: (Constant), SAP, Pemanfaatan TI, Kompetensi SDM, SPIP

b. Dependent Variable: Kualitas LKPD

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1064.870	4	266.218	100.210	.000 ^b
	Residual	156.739	59	2.657		
	Total	1221.609	63			

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

b. Predictors: (Constant), SAP, Pemanfaatan TI, Kompetensi SDM, SPIP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.801	3.294		.547	.586		
	Kompetensi SDM	.346	.108	.302	3.196	.002	.244	4.106
	Pemanfaatan TI	.533	.165	.302	3.231	.002	.248	4.027
	SPIP	.359	.154	.228	2.328	.023	.227	4.403
	SAP	.088	.040	.183	2.170	.034	.306	3.269

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions				
				(Constant)	Kompetensi SDM	Pemanfaatan TI	SPIP	SAP
1	1	4.993	1.000	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.004	37.287	.81	.00	.05	.01	.04
	3	.002	53.833	.00	.02	.27	.07	.58
	4	.001	78.237	.16	.29	.59	.41	.20
	5	.001	82.289	.03	.69	.09	.51	.18

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	53.63	77.97	64.42	4.111	64
Std. Predicted Value	-2.624	3.296	.000	1.000	64
Standard Error of Predicted Value	.221	.792	.431	.149	64
Adjusted Predicted Value	53.75	77.97	64.41	4.092	64
Residual	-2.635	5.165	.000	1.577	64
Std. Residual	-1.617	3.169	.000	.968	64
Stud. Residual	-1.700	3.485	.004	1.014	64
Deleted Residual	-2.934	6.248	.012	1.735	64
Stud. Deleted Residual	-1.728	3.878	.009	1.042	64
Mahal. Distance	.172	13.900	3.938	3.437	64
Cook's Distance	.000	.509	.021	.064	64
Centered Leverage Value	.003	.221	.063	.055	64

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pemanfaatan TI	64	25	40	2044	31.94	2.500	6.250
SPIP	64	32	49	2569	40.14	2.794	7.805
Kompetensi SDM	64	52	71	3853	60.20	3.843	14.768
Kualitas LKPD	64	53	78	4123	64.42	4.403	19.391
SAP	64	97	145	7570	118.28	9.195	84.555
Valid N (listwise)	64						

Lampiran 7

Tabel Distribusi (r tabel)

Tabel r untuk df = 1 - 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Lampiran 8

Tabel Distribusi (t tabel)

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Lampiran 9

Tabel Distribusi (f tabel)

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.42	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Lampiran 10

Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : feh@unjember.ac.id

Nomor : 1874/UN25.1.4/LT/2018 09 Maret 2018
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Ijin Penelitian

Yth. Ketua LP2M
Universitas Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk kegiatan penyelesaian studi dari mahasiswa berikut ini :

N a m a : Khoiriana
N I M : 140810301142
Jurusan : S1 - Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

yang bersangkutan bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (skripsi) yang berjudul **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Jember)** sebagaimana yang tersebut dalam proposal. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapatnya diterbitkan surat permohonan ijin penelitian kepada:

- Kepala Pemerintahan Kabupaten Jember, Jl. Sudarman No. 01 Jember Jawa Timur
- Kepala Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember, Jl. Letjen S. Parman No. 89 Jember

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Zainuri., M.Si
NIP. 19640325 198902 1001

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
 Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 1114/UN25.3.1/LT/2018

13 Maret 2018

Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. **Kepala**
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Jember
 Di
 Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember nomor 1874/UN25.1.4/LT/2018 tanggal 9 Maret 2018 perihal Ijin Penelitian,

Nama : Khoirina
 NIM : 140810301142
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi
 Alamat : Jl. Brantas Raya No.237/A Sumbarsari-Jember
 Judul Penelitian : "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"
 Lokasi Penelitian : Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
 Jl. Sudarman No.1 Jember
 Lama Penelitian : 2 Bulan (15 Maret-30 Mei 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Dr. Susanto, M.Pd.
 NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth
 1. Kepala Pemkab Jember;
 2. Dekan FEB Univ Jember;
 3. Mahasiswa ybs;
 4. Arsip.



CERTIFICATE NO : QMS/173

Lampiran 11

Surat Rekomendasi


PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jember
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 072/631/415/2018

Tentang
PENELITIAN

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Memperhatikan :

Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 13 Maret 2018 Nomor : 1114/UN25.3.1/LT/2018 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Khoirina / 140810301142
Instansi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
Alamat : Jl. Brantas Raya 237/A Sumbersari Jember
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :
"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Standar Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah"
Lokasi : Badan Pendapatan Daerah
Waktu Kegiatan : Maret s/d Mei 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 15-03-2018
An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kaitan Bangsa dan Politik

ACHMAD DAVID S. S. S
Pengetahuan
NIP. 19890812-8096021-001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua LP2M Universitas Jember;
2. Yang Bersangkutan.

Handwritten notes:
✓ B. Sdr.
2.118 Nisa

Lampiran 12

Surat Ijin Penelitian dari SKPD

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
DINAS KESEHATAN
Jl. Srikoyo I/03 Jember Telp. (0331) 487577 Fax (0331) 426624
Website : dinkes.jemberkab.go.id E-mail : sikdajember@yahoo.co.id

Jember, 14 Mei 2018

Nomor : 440 /27921/311/ 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada :
Yth. Sdr 1. Kepala Subbag Program dan Informasi
2. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Subbag Keuangan dan Aset

di -
JEMBER

Menindak lanjuti surat Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Jember Nomor : 072/631/415/2018, Tanggal 15 Maret 2018, Perihal Ijin Penelitian, dengan ini harap saudara dapat memberikan data seperlunya kepada :

Nama : Khoirina
NIM : 140810301142
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 kampus Tegal Boto Jember
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
Keperluan : Melaksanakan Penelitian Tentang :
➤ Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Waktu Pelaksanaan : 14 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018

Schubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan, dengan catatan:

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan penelitian
2. Tidak dibenarkan melakukan aktifitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan

Selanjutnya Saudara dapat memberi bimbingan dan arahan kepada yang bersangkutan.

Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEMBER**

dr. SITI NURUL QOMARIYAH, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680206 199603 2 004

Tembusan:
Yth. Sdr. Yang bersangkutan
di Tempat



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : <i>Badan Kesatuan Bqs & Polihl</i>	Diterima tanggal : <i>3 Mei 2018</i>
Tanggal surat : <i>15 Maret 2018</i>	Nomor agenda : <i>434</i>
Nomor surat : <i>072/631/415/2018</i>	Sifat surat : <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Biasa
Perihal : <i>Penelitian</i>	
Sedia Yth. Bpk. Kepala Badan Pendapatan Daerah	
Diteruskan ke :	Isi Disposisi
<input type="checkbox"/> Sekretaris <input type="checkbox"/> I. Kabid. Pendataan dan Pelayanan <input type="checkbox"/> II. Kabid. Penetapan dan Verifikasi <input type="checkbox"/> III. Kabid. Penagihan dan Keberatan <input type="checkbox"/> IV. Kabid. Pembukuan dan Pengendalian	<p><i>ya. sds. kasubag hum dan kepegkeraan</i> <i>ng. sds. sds. A</i> <i>setoran</i> <i>7/5-12</i></p>

Lampiran 13

Dokumentasi



Gambar Pengisian Kuesioner oleh Responden